

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2019

*Menuju Terwujudnya OKU Selatan Yang Bersama
(Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju, dan Adil)*



**BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN OKU SELATAN**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten OKU Selatan**

Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 12 Muaradua

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2019

*Menuju Terwujudnya OKU Selatan Yang Bersama
(Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju, dan Adil)*



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2019**

| | |
|------------------|---|
| Katalog | : - |
| ISBN | : - |
| Nomor Publikasi | : - |
| Ukuran Buku | : 16 cm x 21 cm |
| Jumlah Halaman | : xiv + 113 halaman. |
| Naskah | : Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Selatan |
| Penyunting | : Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Selatan |
| Diterbitkan Oleh | : Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Selatan |

KATA SAMBUTAN

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara masif dan berkesinambungan di segala bidang terutama pembangunan manusianya. Setiap pembangunan yang telah maupun akan dilaksanakan harus dimulai dari proses perencanaan yang komprehensif, kemudian dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya dan dievaluasi kinerja dari pembangunan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 menggambarkan tentang capaian pembangunan manusia Kota Surabaya dengan metode penghitungan IPM terbaru. Data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia dari hasil penghitungan besaran IPM beserta indeks komponen-komponen penyusunnya serta perkembangannya.

Oleh karena itu saya menyambut baik telah diterbitkannya Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKU Selatan tahun 2019 ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Muaradua, September 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten OKU Selatan
Kepala,

NATALION, S.STP., M.Si.
NIP. -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak cukup hanya berdasarkan pada masyarakat yang berdaya dari sisi ekonomi tetapi juga harus mencakup berbagai aspek sosial yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, pembangunan yang terjadi juga harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata. Paradigma kesejahteraan untuk direpresentasikan kondisi keseluruhan, di mana dengan mengukur seberapa tinggi perekonomian daerah tersebut mampu tumbuh. Dewasa ini, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang dapat sepenuhnya dapat memberi gambaran keberhasilan pembangunan yang lebih nyata. Begitu banyak indikator kesejahteraan baik dari sisi tingkat pendapatan, angka kemiskinan, kesenjangan, kebahagiaan hidup hingga akses serta kebebasan dalam berpolitik adalah ukuran yang termasuk dalam taraf kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan kompleksitas persoalan yang melingkupinya, pembangunan mengandung makna baru bagi para ekonom masa kini, dimana proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkelanjutan dari suatu sistem tatanan sosial menuju masyarakat yang adil dan sejahtera yang berdaya disegala aspek kehidupan. Dengan demikian, dewasa ini pembangunan menempatkan manusia tidak sebatas sebagai obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyeknya. Sehingga pembangunan menjadi sebuah proses

untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia mulai dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi (daya beli).

. Hal ini sejalan juga dengan tujuan dari semangat otonomi daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa otonomi daerah memiliki tujuan *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.*

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom telah dan terus berupaya melaksanakan amanat undang-undang tersebut secara serius dan maksimal. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun dan memiliki visi (2016-2020) Terwujudnya OKU Selatan Yang “Bersama”, (Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju Dan Adil); Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara masif dan berkesinambungan di segala bidang terutama pembangunan manusianya.

Menyadari bahwa pemerintah daerah adalah pihak utama dalam kepastian berjalannya pembangunan manusia di daerah. Bahkan dewasa ini, hasil pencapaian pembangunan manusia di daerah menjadi evaluasi dasar kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang luas tentang paradigma pembangunan manusia agar prosesnya dapat berjalan dengan benar sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal. Salah satu misi dalam rangka membangun manusia di Kabupaten OKU Selatan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memiliki misi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi dan sumber daya lokal.

Pembangunan manusia adalah tentang kebebasan manusia dalam segala hal; kebebasan dalam merealisasikan segala potensi yang dimiliki manusia dalam kehidupan dan mencakup semua lapisan masyarakat baik saat ini maupun di masa mendatang (UNDP, 2016). Pembangunan manusia juga merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia (masyarakat). Di antara berbagai pilihan, yang terpenting yaitu berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Konsep pembangunan manusia adalah pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian berarti, apapun kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya semua bermuara pada masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Sehingga akan terwujud masyarakat unggulan baik secara individu maupun komunitas. Secara fisik mereka sehat dan berumur panjang, secara mental mereka cerdas dengan intelektual tinggi dengan penuh ketenteraman dan kesejahteraan.

Empat komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia adalah produktivitas, ekuitas, kesinambungan, dan pemberdayaan (*Human Development index*, UNDP 1995). *Produktivitas*, berarti terciptanya masyarakat yang mampu meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses memperoleh penghasilan. *Ekuitas*, adalah adanya jaminan dan kepastian kepada masyarakat dalam akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang

ekonomi dan politik harus dihapus. *Kesinambungan*, berarti adanya kepastian bahwa akses untuk memperoleh kesempatan tersebut tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. *Pemberdayaan*, bahwa pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, mereka harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terarah, sehingga pembangunan manusia merupakan perwujudan jangka panjang dari masyarakat itu sendiri, yaitu meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur dari hasil pencapaian pembangunan manusia yang telah berhasil dilakukan pemerintah daerah. Angka IPM ini selalu menjadi ukuran keterbandingan antar daerah, baik regional dalam lingkup provinsi maupun secara nasional bahkan internasional. Dengan demikian ketersediaan data IPM sangatlah penting setiap saat, sebagai salah satu ukuran yang mencerminkan dampak dari keberhasilan pembangunan di daerah.

IPM disusun dari tiga dimensi pembangunan manusia yakni dimensi kesehatan yang dicerminkan dengan indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan yang dicerminkan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta dimensi ekonomi yang dicerminkan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*). Sejak tahun 2010 hingga 2019, IPM Kabupaten OKU Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten OKU Selatan hanya sebesar 58,88 kemudian meningkat terus ditahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 65,43 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia selama kurun waktu ini selalu mengalami perbaikan. Pemerintah harus selalu

meningkatkan IPM ini dengan cara melakukan perbaikan dan peningkatan pada indikator-indikator penyusunnya pada setiap dimensi. Peningkatan di satu dimensi saja tidak cukup, karena pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh dari semua dimensi tersebut. Peningkatan di satu dimensi tidak dapat menggantikan kelemahan pada dimensi lainnya. Dimensi kesehatan misalnya yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Untuk meningkatkan AHH ini maka kematian bayi harus ditekan. Sedangkan untuk mengurangi angka kematian bayi maka diperlukan kerja keras yang melibatkan banyak pihak. Agar bayi tetap sehat hingga melewati masa kritis harus dimulai dari kesehatan dan asupan gizi sang ibu saat mengandung.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses bagi masyarakat menjadi syarat mutlak. Pemenuhan kebutuhan gizi terutama bagi ibu hamil harus ditopang dengan kemampuan ekonomi keluarga yang mapan. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dari masyarakat pun sangat berpengaruh. Selain itu, ketersediaan sanitasi yang sehat dan air minum bersih yang menjangkau setiap rumah tangga turut juga mempengaruhi angka kematian bayi. Masih banyak lagi hal-hal terkait yang berpengaruh yang melibatkan banyak *stake holder* yang semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya pada dimensi kesehatan saja melainkan juga pada dimensi pendidikan dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA SAMBUTAN..... | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GRAFIK..... | xiii |
| | |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| II. PENGHITUNGAN IPM..... | 13 |
| 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru..... | 14 |
| 2.2. Konsep Dan Definsi IPM Metode Baru..... | 16 |
| 2.3. Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru..... | 18 |
| 2.4. Ukuran Kecepatan Perkembangan IPM Metode Baru..... | 19 |
| 2.5. Klasifikasi Capaian IPM Metode Baru..... | 20 |
| 2.6. Perhitungan IPM Metode Baru..... | 21 |
| 2.7. Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru..... | 24 |
| | |
| III. GAMBARAN UMUM..... | 25 |
| 3.1. Kondisi Geografis..... | 26 |
| 3.2. Kondisi Pemerintahan..... | 27 |
| 3.3. Pembangunan Kependudukan..... | 30 |

| | |
|---|----|
| 3.4. Pembangunan Sektor Kesehatan..... | 42 |
| 3.4.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk..... | 43 |
| 3.4.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan..... | 48 |
| 3.4.3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat..... | 53 |
| 3.5. Pembangunan Sektor Pendidikan | 56 |
| 3.5.1. Angka Melek Huruf..... | 59 |
| 3.5.2. Rata-Rata Lama Sekolah..... | 60 |
| 3.5.3. Tingkat Pendidikan..... | 62 |
| 3.5.4. Tingkat Partisipasi Sekolah..... | 63 |
| 3.6. Pembangunan Sektor Ekonomi | 68 |
| 3.7. Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan..... | 75 |
| | |
| IV IPM KABUPATEN OKU SELATAN..... | 87 |
| 4.1. Dimensi Kesehatan..... | 87 |
| 4.2. Dimensi Pendidikan..... | 91 |
| 4.3. Dimensi Ekonomi..... | 94 |
| 4.4. IPM Kabupaten OKU Selatan..... | 96 |
| V LAMPIRAN TABEL..... | 95 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Batas Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM Metode Baru | 19 |
| Tabel 2.2 | Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru | 24 |
| Tabel 3.1. | Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 28 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2018 dan 2019..... | 32 |
| Tabel 3.3. | Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018-2019..... | 49 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019..... | 50 |
| Tabel 3.5. | Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019..... | 51 |
| Tabel 3.6. | Persentase Kelahiran Menurut Tenaga Penolong Persalinan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019..... | 52 |
| Tabel 3.7. | Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019..... | 62 |
| Tabel 3.8. | Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019..... | 64 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 3.9. | Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019..... | 65 |
| Tabel 3.10. | Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019..... | 67 |
| Tabel 3.11. | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2019..... | 72 |
| Tabel 3.12. | Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 73 |
| Tabel 3.13. | Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 74 |
| Tabel 3.14. | Persentase penduduk miskin Kabupaten OKU Selatan tahun 2012-2019..... | 80 |
| Tabel 4.1 | IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018..... | 100 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Klasifikasi Capaian IPM Metode Baru..... | 21 |
| Gambar 2.2 | Skema Perhitungan IPM Metode Baru..... | 23 |
| Gambar 3.1 | Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 33 |
| Gambar 3.2 | Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 36 |
| Gambar 3.3 | Angka Ketergantungan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019..... | 37 |
| Gambar 3.4. | Piramida Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 40 |
| Gambar 3.5 | Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum) | 43 |
| Gambar 3.6 | Angka Harapan Hidup Saat Lahir Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019..... | 45 |
| Gambar 3.7. | Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan dan Rata-Rata Lama Sakit Tahun 2012-2019..... | 47 |
| Gambar 3.8. | Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 54 |
| Gambar 3.9. | Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Sehat Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019..... | 55 |
| Gambar 3.10. | Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019..... | 59 |
| Gambar 3.11. | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019..... | 61 |
| Gambar 3.12. | Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten | |

| | | |
|--------------|---|----|
| | Ogan Komering Ulu Selatan, 2014-2019..... | 69 |
| Gambar 3.13. | Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012 – 2019..... | 82 |
| Gambar 3.14. | Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2019..... | 84 |
| Gambar 4.1 | Angka Harapan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019..... | 90 |
| Gambar 4.2 | Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25+ Kabupaten OKU Selatan tahun 2010-2019..... | 93 |
| Gambar 4.3 | Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (<i>Purchasing Power Parity/PPP</i>) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019..... | 95 |
| Gambar 4.4 | Angka Dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2019..... | 98 |

PENDAHULUAN

1

Di usia nya yang ke-15 tahun pada tahun 2019 ini, capaian-capaian hasil pembangunan dapat terus dirasakan oleh masyarakat terutama meningkatnya taraf hidup.



Sumber: <https://www.egindo.co>

Agenda prioritas pembangunan nasional saat ini mengusung cita-cita dan semangat perjuangan Soekarno, yang disebut Nawacita. Istilah ini diserap dari bahasa Sansekerta. Nawa berarti sembilan dan Cita yang berarti harapan, agenda, keinginan. Nawacita berisi sembilan agenda prioritas untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting dalam agenda pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik.

Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam RPJMN 2015-2019 buku I, peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan melalui 4 sub agenda prioritas, yaitu :

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
- b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat.
- d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan terus berupaya meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan segala potensi yang dimiliki. Di usianya yang ke 15 tahun pada tahun 2019 ini, capaian-capaian hasil pembangunan dapat terus dirasakan oleh masyarakat terutama meningkatnya taraf hidup. Akan tetapi sebenarnya keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak cukup hanya berdasarkan pada masyarakat yang berdaya dari sisi ekonomi tetapi juga harus mencakup berbagai aspek sosial yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, pembangunan yang terjadi juga harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata. Paradigma kesejahteraan untuk direpresentasikan kondisi keseluruhan, di mana dengan mengukur seberapa tinggi perekonomian daerah tersebut mampu tumbuh. Dewasa ini, tidak hanya

pertumbuhan ekonomi yang sepenuhnya dapat memberi gambaran keberhasilan pembangunan yang lebih nyata. Begitu banyak indikator kesejahteraan baik dari sisi tingkat pendapatan, angka kemiskinan, kesenjangan, kebahagiaan hidup hingga akses serta kebebasan dalam berpolitik adalah ukuran yang termasuk dalam taraf kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan kompleksitas persoalan yang melingkupinya, pembangunan mengandung makna baru bagi para ekonom masa kini, dimana proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkelanjutan dari suatu sistem tatanan sosial menuju masyarakat yang adil dan sejahtera yang berdaya disegala aspek kehidupan. Dengan demikian, dewasa ini pembangunan menempatkan manusia tidak sebatas sebagai obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyeknya. Sehingga pembangunan menjadi sebuah proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia mulai dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi (daya beli).

Memasuki Usia yang ke-15 (tahun 2019), progres pembangunan manusia di Kabupaten OKU Selatan telah menunjukkan kemajuan walaupun belum signifikan. Masyarakat OKU Selatan saat ini dapat hidup di usia yang lebih panjang, lebih banyak anak-anak dapat bersekolah, dan lebih luas lagi masyarakat dapat mengakses pelayanan umum dasar seperti pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari proses pembangunan manusia adalah memperluas kebebasan memilih/pilihan untuk memperoleh segala sesuatu yang masyarakat anggap bernilai. Kebebasan memilih tersebut memiliki dua aspek

dasar yaitu kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan dalam membuat keputusan. Hal ini sejalan juga dengan tujuan dari semangat otonomi daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa otonomi daerah memiliki tujuan *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.*

Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat tiga hal yang berkaitan dengan masyarakat dari tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Masyarakat sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat merasakan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah karena otonomi dapat memperpendek jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Kemudian setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom telah melaksanakan amanat undang-undang tersebut secara serius dan maksimal. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun dan dengan Moto “WISATA”, yaitu **Wibawa, Indah, Sejahtera, Adil, Tertib, dan Aman**; serta visi **(2016-2020)** Terwujudnya Oku Selatan Yang “Bersama”, (Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju Dan Adil); Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara masif dan berkesinambungan di segala bidang terutama pembangunan manusianya. Salah satu misi dalam rangka membangun manusia di Kabupaten OKU Selatan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memiliki misi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi dan sumber daya lokal.

Pembangunan manusia adalah tentang kebebasan manusia dalam segala hal; kebebasan dalam merealisasikan segala potensi yang dimiliki manusia dalam kehidupan dan mencakup semua lapisan masyarakat baik saat ini maupun di masa mendatang (UNDP, 2016). Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Namun, pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian

besar penduduknya. Pada tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi masyarakat.

Sejak tahun 1990 UNDP telah memperkenalkan suatu pendekatan baru untuk mengukur kesejahteraan manusia yang mencakup seluruh aspek. Pendekatan ini diharapkan dapat digunakan di semua wilayah dan bermanfaat untuk selamanya. Pendekatan baru tersebut bermakna lebih dari sekedar pembangunan ekonomi dalam lingkup sempit, dengan kata lain meliputi seluruh pilihan manusia yang terus berkembang. Titik berat pendekatan baru tersebut terletak pada : menempatkan manusia, baik kebutuhannya, aspirasinya dan kemampuannya pada titik pusat kegiatan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan dengan alasan apapun.

Pendekatan baru tersebut bernama pembangunan manusia. *Human Development* (Pembangunan Manusia) merupakan suatu paradigma yang menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari, oleh dan untuk penduduk. Dalam kerangka ini maka pembangunan daerah ditujukan untuk dapat meningkatkan partisipasi penduduk dalam semua proses kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas

(pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan takwa), sehingga partisipasi penduduk dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. Hal ini selain sesuai dengan tujuan pembangunan, yang termaktub dalam UUD 1945, yakni “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, secara implisit juga mengandung makna pemberdayaan penduduk.

Untuk itu kehidupan masyarakat di suatu daerah perlu dipantau perkembangannya, terutama yang berkaitan dengan kemajuannya setelah satu periode, yang dalam konteks pembangunan berarti mengevaluasi kinerja pembangunan di suatu wilayah. Pemantauan dimaksud juga dilakukan dalam kerangka akuntabilitas publik yang mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat kabupaten.

Bidang kehidupan yang perlu dipantau meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan individu maupun yang berkaitan dengan wilayah. Dalam konteks bahwa masyarakat merupakan objek pembangunan maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan keadaan masyarakat itu sendiri. Indikator ini disusun sebagai *Human Development Report* (HDR) atau Laporan Pembangunan Manusia (LPM). LPM ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan dimaksud akan dilihat apakah sudah berwawasan “Pembangunan Manusia”, yaitu pembangunan yang

bertujuan untuk memperluas peluang atau memperluas pilihan bagi masyarakatnya.

Oleh karena manusia sebagai masyarakat itu merupakan subjek yang melakukan pembangunan, yang juga sekaligus merupakan objek yang akan dibangun dan yang akan menikmati hasil pembangunan itu sendiri, maka sangat diperlukan sekali LPM tersebut. LPM di suatu wilayah menggunakan alat ukur berupa angka *Human Development Index* (HDI) atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Konsep pembangunan manusia menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 1990) adalah melihat keterlibatan atau partisipasi aktif penduduk dalam pembangunan, mulai dari sejak perumusan, penentuan kebijakan hingga evaluasi, sehingga disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada penduduk (*people centered development*): oleh, tentang dan untuk penduduk. Secara harfiah "*people centered development*" dijabarkan sebagai berikut :

- *Oleh Penduduk* ; berupa upaya untuk memperkuat (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- *Tentang Penduduk* ; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
- *Untuk Penduduk* ; berupa penciptaan peluang kerja.

Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*), yaitu kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) terhadap kemampuan atau keterampilan mereka. Jadi konsep pembangunan tersebut mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pengembangan SDM, sebab konsep UNDP menjelaskan bahwa pembangunan manusia didukung empat unsur yaitu ; produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

Pengukuran pembangunan manusia difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap paling penting bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standard*), menurut UNDP keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah dapat terealisasi jika penduduk paling tidak memiliki : peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, dilakukan dengan sistem pengukuran yang dipakai UNDP dalam menyusun IPM global. Hal ini didorong dengan harapan agar indeks yang dihasilkan terbanding secara nasional maupun internasional.

Empat komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia

Produktifitas

Rakyat harus difungsikan untuk meningkatkan produktifitasnya sendiri dan berpartisipasi secara penuh dalam proses peningkatan pendapatan dan penciptaan pekerjaan yang layak. Jadi pembangunan ekonomi adalah bagian dari model pembangunan manusia.

Kesetaraan

Rakyat harus mempunyai kesempatan yang sama. Segala halangan untuk mengakses kesempatan berpolitik dan ekonomi harus dihilangkan sehingga rakyat dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini.

Kesinambungan

Akses terhadap kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi mendatang. Segala bentuk modal (fisik, manusia, lingkungan) harus tercukupi setiap waktu.

Pemberdayaan

Pembangunan harus dari rakyat, bukan hanya untuk rakyat. Rakyat harus berpartisipasi secara penuh dalam keputusan dan proses yang membentuk kehidupan mereka.

(UNDP, HDR 1995)

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, kegiatan penyusunan IPM memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan regional, khususnya pembangunan manusia. Dalam evaluasi pembangunan manusia, IPM ini dapat diamati perkembangannya setiap periode (biasanya

tahunan), sehingga dapat diamati seberapa besar percepatan pembangunan manusia antar periode. Di sisi lain, secara *cross section* IPM juga dapat diperbandingkan antar wilayah, yang menunjukkan posisi relatif pembangunan manusia suatu wilayah terhadap wilayah lainnya.

Sebagai daerah yang terus memacu dan melanjutkan pembangunan, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dapat memanfaatkan IPM ini sebagai identifikasi awal (*starting point*) mengenai kondisi pembangunan manusia saat ini sehingga dapat disusun suatu target pencapaian pembangunan manusia untuk periode selanjutnya. Dalam skala regional, melalui tersusunnya IPM Kabupaten OKU Selatan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten OKU Selatan terhadap daerah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, manfaat Indeks pembangunan manusia telah dijadikan sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah (*fiscal gap*) dan memacu pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan dalam mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Dengan adanya DAU diharapkan nantinya daerah dengan capaian IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain dengan capaian IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang lebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan masing-masing daerah apakah

mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

PENGHITUNGAN IPM

2

Pengukuran

Pembangunan manusia difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap paling penting bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living standard)



Pembangunan manusia merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dasar dan daya beli masyarakat. Peningkatan kapasitas dasar

merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas penduduk melalui pengembangan pengetahuan dan pendidikan masyarakat serta perbaikan derajat kesehatannya. Sedangkan peningkatan daya beli dilakukan melalui perbaikan ekonomi sehingga masyarakat memperoleh kesempatan kerja dengan mudah.

Tahap pertama dalam penghitungan IPM adalah menentukan indikator dari masing-masing dimensi pembangunan manusia. Dalam penghitungan IPM menggunakan metode baru yang mulai digunakan pada tahun 2010, dimensi umur panjang dan sehat diukur menggunakan indikator umur harapan hidup penduduk pada saat lahir (UHH) dalam satuan tahun. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan dua indikator yakni angka harapan lama sekolah (HLS) dalam satuan tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam satuan tahun. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan telah menyelesaikan masa belajar. Referensi penduduk 25 tahun ke atas ini lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dibandingkan dengan kelompok usia 15 tahun ke atas. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan daya beli (PPP) dalam satuan rupiah. Selain penyempurnaan indikator, metode agregasi indikator juga disempurnakan dari rata-rata hitung (aritmatika) menjadi rata-rata ukur (geometrika).

2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Pada dasarnya, IPM merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia yang didasarkan pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup yakni kesehatan, pendidikan dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Sebelumnya, BPS menggunakan indikator angka harapan hidup (AHH) untuk

mengukur komponen kesehatan, angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah usia 15 tahun keatas untuk komponen pendidikan dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk komponen tingkat kesejahteraan ekonomi. Namun, mulai tahun 2014 ini BPS melakukan perubahan metodologi dalam menghitung IPM dengan alasan bahwa beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang digunakan dalam perhitungan IPM selama ini tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Hal lain yang juga menyebabkan dilakukannya perubahan metodologi ini adalah penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM selama ini menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain padahal capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh dimensi lainnya.

Oleh karena itu, dalam metode baru ini AMH pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita serta metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Sehingga metode baru ini memiliki beberapa keunggulan daripada metode sebelumnya. Keunggulan – keunggulan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Digunakannya indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Hal ini karena dengan memasukkan RLS dan angka HLS, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Digunakannya rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

2.2. Konsep Dan Definsi IPM Metode Baru

Beberapa konsep dalam IPM metode baru ini adalah sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke

atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren dimana data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama. HLS dihitung dengan rumus,

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana,

HLS_a^t = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t

FK = Faktor koreksi pesantren

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

dengan,

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

dimana,

$$\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{jumlah santri sekolah}$$

- Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

2.3. Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru

Agar IPM bisa dibandingkan secara global, dalam IPM metode baru ini juga ditentukan batas nilai minimum dan maksimum tiap-tiap komponen IPM yang mengacu pada UNDP kecuali standar daya beli karena menggunakan ukuran

rupiah. Batas minimum dan maksimum tiap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Batas Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM Metode Baru

| Indikator | Satuan | Minimum | Maksimum |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) | Tahun | 20 | 85 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 0 | 18 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 0 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan | Rp | 1.007.436 | 26.572.352 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.4. Ukuran Kecepatan Perkembangan IPM Metode Baru

Dalam IPM metode baru, untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya dan begitupun sebaliknya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

dimana,

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.5. Klasifikasi Capaian IPM Metode Baru

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Dalam IPM metode baru, capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Klasifikasi Capaian IPM Metode Baru



Sumber : Badan Pusat Statistik

2.6. Perhitungan IPM Metode Baru

Dalam perhitungan IPM metode baru, dimensi kesehatan menggunakan indikator AHH, dimensi pendidikan menggunakan indikator HLS dan RLS dan dimensi standar hidup layak dengan menggunakan indikator pengeluaran per kapita. Dari indikator pada masing-masing dimensi kemudian dihitung nilai indeks masing-masing dimensi dengan rumus:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

dan

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

- $I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$
- $I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$

serta,

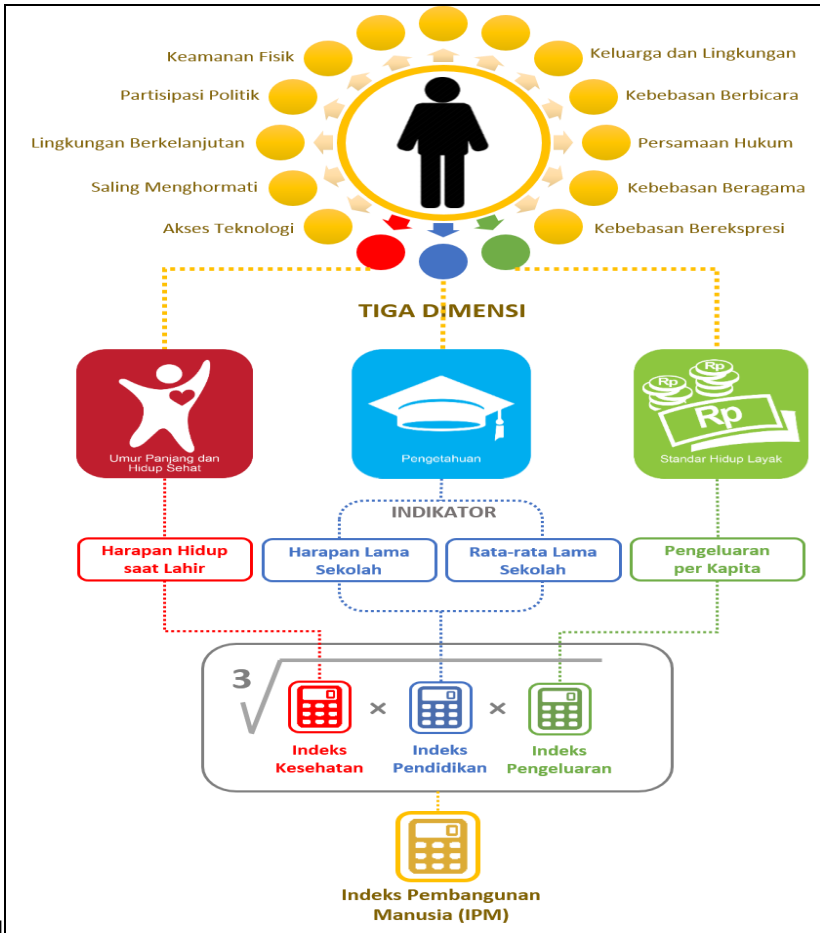
$$I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\text{min}})}{\ln(\text{pendapatan}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pendapatan}_{\text{min}})}$$

Setelah nilai indeks tiap dimensi terbentuk, kemudian menghitung IPM dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Secara singkat, proses perhitungan IPM metode baru ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2. Skema Perhitungan IPM Metode Baru



ru

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.7. Perbedaan IPM Metode Lama Dan Metode Baru

Perhitungan IPM dengan menggunakan IPM metode lama dan metode baru menghasilkan nilai IPM yang berbeda. Secara singkat, perbedaan perhitungan antara IPM metode lama dan baru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru

| DIMENSI | METODE LAMA | METODE BARU |
|----------------------------|--|---|
| Kesehatan | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) |
| Pengetahuan | 1. Angka Melek Huruf (AMH) | 1. Harapan Lama Sekolah (HLS) |
| | 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
| Standar Hidup Layak | Pengeluaran per kapita | Pengeluaran per kapita |
| Agregasi | <p>Rata-rata Hitung</p> $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$ | <p>Rata-rata Ukur</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$ |

Sumber : Badan Pusat Statistik

GAMBARAN UMUM

3



Sumber: <https://mattanews.co/>

Visi Kabupaten OKU Selatan 5 Tahun Mendatang (2016-2020) Yakni “Terwujudnya OKU Selatan Yang “Bersama” (Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju Dan Adil). Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan di segala lini terus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten OKU Selatan.

3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten OKU Selatan merupakan wilayah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 45 sampai 1.643 meter di atas permukaan laut, terletak di antara 4° 14' sampai 4° 55' Lintang Selatan dan 103° 22' sampai 104° 21' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten OKU Selatan adalah 5.493,94 km².

Kabupaten OKU Selatan yang terbentuk pada tahun 2004, memiliki wilayah administrasi yang terbagi 19 kecamatan. Sebagian besar wilayah kecamatan merupakan dataran tinggi. Hanya 6 kecamatan saja yang relatif datar, yaitu Kecamatan Muaradua, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung, dan Runjung Agung. Wilayah tertinggi di Kabupaten OKU Selatan adalah Gunung Seminung di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, dengan ketinggian 1.888 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten OKU Selatan terdiri dari:

45 m - 100 m = 0,22 %

101 m - 500 m = 39,85 %

501 m -1000 m = 33,95 %

1.001 m ke atas = 25,98 %

Batas wilayah Kabupaten OKU Selatan adalah:

- Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan, dan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung.
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.

Kabupaten OKU Selatan dialiri oleh dua sungai besar yang bermuara ke Sungai Komering, yaitu Sungai Saka dan Sungai Selabung. Selain itu, terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lain yang tersebar di seluruh wilayah. Kabupaten OKU Selatan juga memiliki beberapa danau, baik yang besar maupun agak kecil, sehingga daerah ini merupakan salah satu daerah pariwisata potensial di Propinsi Sumatera Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung.

3.2. Kondisi Pemerintahan

Kabupaten OKU Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian, melalui Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003, OKU Selatan dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom.

Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Desa/Kelurahan |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Mekakau Ilir | 26.115 | 15 |
| 2 | Banding Agung | 27.638 | 22 |
| 3 | Warkuk Ranau Selatan | 23.948 | 16 |
| 4 | BPR Ranau Tengah | 35.320 | 22 |
| 5 | Buay Pemaca | 71.452 | 22 |
| 6 | Simpang | 34.229 | 7 |
| 7 | Buana Pemaca | 19.010 | 8 |
| 8 | Muaradua | 26.195 | 14 |
| 9 | Buay Rawan | 16.700 | 11 |
| 10 | Buay Sandang Aji | 45.000 | 16 |
| 11 | Tiga Dihaji | 15.345 | 8 |
| 12 | Buay Runjung | 17.119 | 14 |
| 13 | Runjung Agung | 15.741 | 9 |
| 14 | Kisam Tinggi | 41.700 | 19 |
| 15 | Muaradua Kisam | 21.980 | 18 |
| 16 | Kisam Ilir | 13.602 | 9 |
| 17 | Pulau Beringin | 47.651 | 13 |
| 18 | Sindang Danau | 21.000 | 7 |
| 19 | Sungai Are | 29.649 | 9 |
| Jumlah | | 549.394 | 259 |

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Sejak berdirinya Kabupaten OKU Selatan, telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 10 kecamatan. Pada tahun 2006 dimekarkan menjadi 16 kecamatan dan selanjutnya pada tahun 2007 dimekarkan kembali menjadi 19 kecamatan sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 259 yang terdiri dari 252 desa dan 7 kelurahan.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 40 orang, dengan 36 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dari 40 orang anggota dewan tersebut, 22 orang berpendidikan SLTA, 15 orang berpendidikan S1 dan 3 orang berpendidikan S2. Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari 6 fraksi, yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi Hati Nurani Demokrat Indonesia, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PPP. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten OKU Selatan dibentuk 4 Komisi dan 1 Koordinator/Pimpinan DPRD Kabupaten OKU Selatan. Untuk komisi I (Pemerintahan) beranggota 8 orang, komisi II (Ekonomi) beranggota 10 orang, komisi III (Keuangan) beranggota 10 orang, komisi IV (Pendidikan dan Kesejahteraan) beranggota 9 orang, dan 3 orang Koordinator/Pimpinan DPRD OKU Selatan.

3.3. Pembangunan Kependudukan

Indikator kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Hal ini karena telah disadari bahwa penduduk bukan saja sebagai objek pembangunan namun yang terpenting adalah sebagai subjek pembangunan dan hasil dari pembangunan harus bermuara pada penduduk itu sendiri. Penduduk adalah seseorang yang menetap di suatu wilayah selama minimal 6 bulan atau berniat menetap di wilayah tersebut minimal 6 bulan ke depan. Penduduk adalah aset pembangunan yang memegang peranan penting karena menjadi sumber daya manusia bagi terlaksananya pembangunan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 361.085 jiwa yang terdiri atas 189.008 jiwa penduduk laki-laki dan 172.077 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Banding Agung masing-masing sebesar 1,18 persen dan yang terendah berada di Kecamatan Mekakau Ilir dan Sungai Are hanya 1,0 persen.

Laju pertumbuhan penduduk setiap tahun di Kabupaten OKU Selatan selalu di atas 1 (satu) persen walaupun terus menurun. Tentu hal ini sebagai dampak dari berkembangnya daerah yang diikuti oleh pesatnya kemajuan alat

transportasi dan teknologi informasi dewasa ini. Mobilisasi penduduk keluar dan masuk di Kabupaten OKU Selatan sangat mudah dengan berbagai motivasinya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten OKU Selatan perlu menentukan arah kebijakan kependudukan yang tepat. Tiga aspek utama kebijakan kependudukan wajib mengaitkan antara penduduk dan lingkungannya agar tercipta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Yang dimaksud serasi, selaras, dan seimbang masih bermakna luas sesuai dengan dinamika pembangunan yang terus berubah.

Pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan kependudukan dengan program-program yang tepat sasaran dan tepat guna. Memang perlu sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan kependudukan dapat tercapai. Menurut Endriartono Sutarto (2012), keadaan penduduk yang dicita-citakan di masa depan adalah: 1). Rata –rata tingkat pendidikan penduduk semakin tinggi; 2).Penduduk semakin sehat; 3). Struktur penduduk bergeser ke usia penduduk tua;4).Semakin banyak penduduk tinggal di perkotaan; 5). Meningkatnya jumlah rumah tangga namun ukuran keluarga mengecil; 6).Tingginya intensitas mobilitas penduduk; 7).Tingginya pertumbuhan angkatan kerja; dan 8.) Terjadi perubahan lapangan kerja.

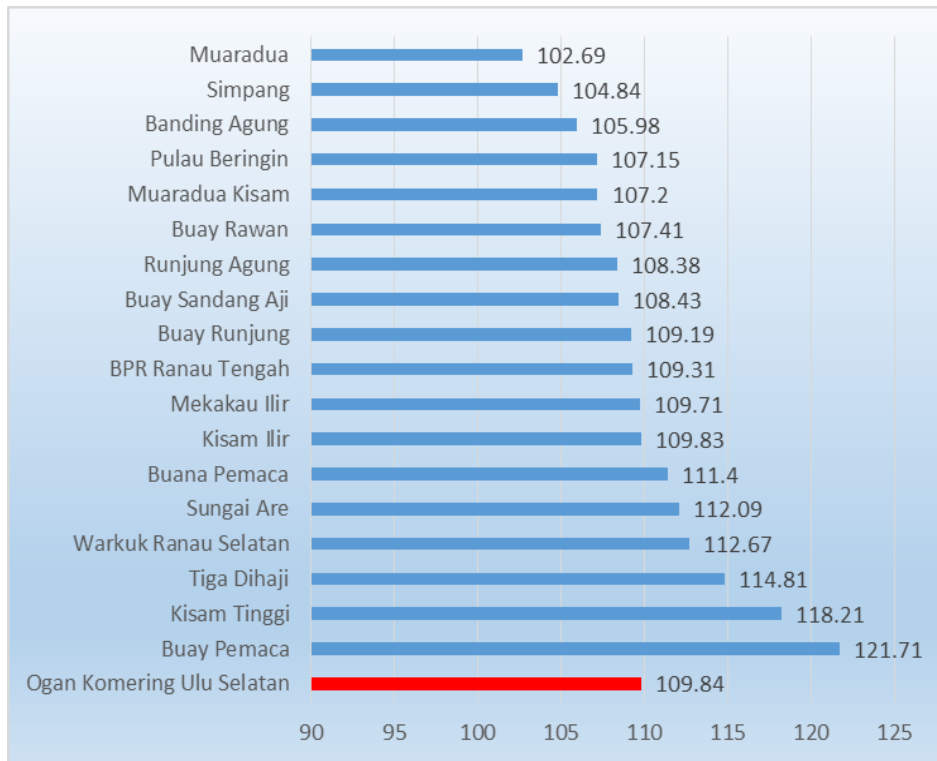
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2018 dan 2019

| Kecamatan | Jumlah Penduduk | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Mekakau Ilir | 19 871 | 20 069 | 1,08 | 1,00 |
| 2. Banding Agung | 21 006 | 21 253 | 1,23 | 1,18 |
| 3. Warkuk Ranau Selatan | 22 866 | 23 136 | 1,26 | 1,18 |
| 4. BPR Ranau Tengah | 21 800 | 22 055 | 1,23 | 1,17 |
| 5. Buay Pemaca | 43 247 | 43 719 | 1,17 | 1,09 |
| 6. Simpang | 14 453 | 14 607 | 1,12 | 1,07 |
| 7. Buana Pemaca | 13 134 | 13 274 | 1,13 | 1,07 |
| 8. Muaradua | 47 324 | 47 852 | 1,18 | 1,12 |
| 9. Buay Rawan | 13 339 | 13 492 | 1,23 | 1,15 |
| 10. Buay Sandang Aji | 18 073 | 18 273 | 1,16 | 1,11 |
| 11. Tiga Dihaji | 9 716 | 9 819 | 1,11 | 1,06 |
| 12. Buay Runjung | 10 552 | 10 673 | 1,22 | 1,15 |
| 13. Runjung Agung | 12 019 | 12 153 | 1,18 | 1,11 |
| 14. Kisam Tinggi | 19 287 | 19 501 | 1,19 | 1,11 |
| 15. Muaradua Kisam | 18 358 | 18 565 | 1,21 | 1,13 |
| 16. Kisam Ilir | 7 513 | 7 598 | 1,20 | 1,13 |
| 17. Pulau Beringin | 25 321 | 25 612 | 1,22 | 1,15 |
| 18. Sindang Danau | 9 254 | 9 362 | 1,23 | 1,17 |
| 19. Sungai Are | 9 972 | 10 072 | 1,07 | 1,00 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 352 926 | 361 085 | 1,18 | 1,11 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 109,84. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, dimana pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki.

Gambar 3.1 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

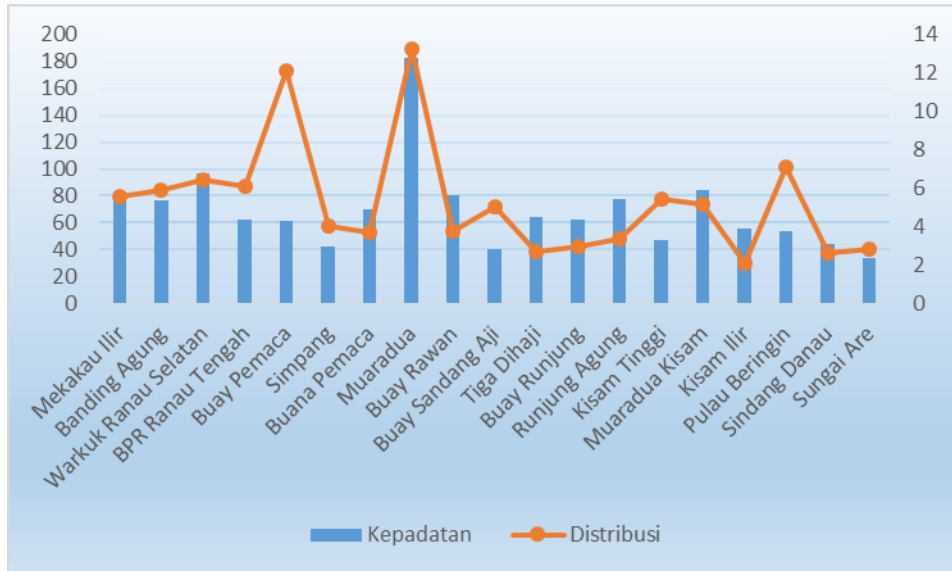
Laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga rasio jenis kelamin sangat berguna dalam analisis kependudukan. Misalnya saja dilihat dari lapangan pekerjaan, penduduk laki-laki pada umumnya memiliki pekerjaan yang lebih berisiko di banding perempuan. Begitu juga dari kebutuhan konsumsi barang dan jasa. Biasanya penduduk laki-laki membutuhkan jumlah yang lebih tinggi dari perempuan dalam hal konsumsi. Selain itu secara kejiwaan pada umumnya laki-laki lebih keras wataknya dan lebih temperamental dibanding perempuan. Dari ketiga contoh perbedaan tersebut, tentu peran pemerintah diperlukan supaya tercipta kehidupan masyarakat yang kondusif. Perlindungan tenaga kerja, jaminan ketersediaan pangan, dan terciptanya suasana keamanan dan ketertiban sangat diperlukan. Begitu juga jika dilihat dari aspek lain, seperti kebutuhan energi seperti BBM atau isu-isu gender lainnya maka akan didapat kajian yang sangat luas.

Jika dilihat menurut kecamatan, rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Buay Pemaca dan yang terendah berada di Kecamatan Muaradua. Kecamatan Buay Pemaca memiliki lebih banyak penduduk laki-laki karena di Kecamatan ini merupakan wilayah perkebunan kopi yang terluas di Kabupaten OKU Selatan sehingga memerlukan banyak pekerja laki-laki. Rata-rata petani kopi di Kecamatan Buay Pemaca tidak menyertakan keluarganya dalam menggarap kebun, mereka meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Rata-rata keluarga mereka berada di Lampung, OKU Timur, dan Pulau Jawa.

Sedangkan di Kecamatan Muaradua, walaupun jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan namun sex rasio nya yang terkecil hal ini karena Muaradua adalah ibu kota kabupaten. Sebagai ibu kota kabupaten OKU Selatan, Kecamatan Muaradua tentu lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih bersahabat dengan perempuan seperti perdagangan, jasa konveksi, jasa keuangan, jasa pemerintahan, dan sebagainya.

Melihat keadaan luas wilayah pada tiap-tiap kecamatan dan dihubungkan dengan jumlah penduduknya, maka akan terlihat ketimpangan kepadatan (*density disparity*) penduduk di Kabupaten OKU Selatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2019 mencapai 66 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 3,78 orang. Kepadatan penduduk di 19 kecamatan cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Muaradua dengan kepadatan sebesar 182,68 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sungai Are sebesar 33,97 jiwa/km². Jika dikaitkan dengan distribusi penduduk, maka ada anomali kepadatan dan distribusi penduduk di Kecamatan Buay Pemaca. Jumlah penduduk Kecamatan Buay Pemaca merupakan yang terbesar kedua di Kabupaten OKU Selatan, akan tetapi tidak diikuti dengan kepadatannya. Artinya bahwa wilayah Kecamatan Buay Pemaca sangat luas. Berbeda dengan Kecamatan Muaradua, selain distribusi penduduknya yang tertinggi juga merupakan kecamatan yang terpadat.

Gambar 3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

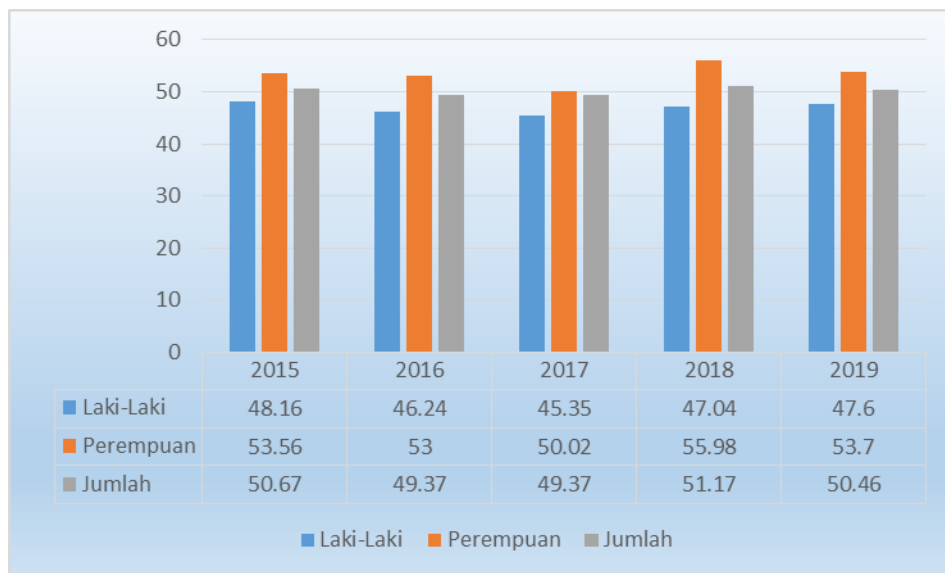


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten OKU Selatan menunjukkan dominasi penduduk usia muda. Rasio ketergantungan penduduk tahun 2019 sebesar 50,46 persen menunjukkan sebanyak 51 orang penduduk usia non produktif akan ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif secara ekonomi. Penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas diasumsikan sebagai penduduk yang non produktif, sedangkan

penduduk usia 15-64 tahun dianggap sebagai penduduk yang produktif yaitu mampu melakukan kegiatan yang bernilai secara ekonomi.

Gambar 3.3 Angka Ketergantungan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Angka ketergantungan suatu daerah sebenarnya dapat mengindikasikan seberapa besar potensi sumber daya manusia suatu wilayah/daerah tersebut. Semakin kecil angka ketergantungan maka semakin besar potensi SDM yang dimiliki demikian juga sebaliknya. Kondisi dimana angka ketergantungan suatu daerah sangat kecil yang berarti daerah tersebut banyak dihuni oleh penduduk

usia produktif maka saat itulah daerah tersebut telah memasuki masa bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Oleh karena itu, bonus demografi dapat menjadi anugerah dengan syarat penduduk tersebut benar-benar produktif dalam segala hal dan akan menjadi bencana apabila sebaliknya. Untuk bisa menjadi produktif dalam segala hal, penduduk tersebut haruslah memiliki bekal yang memadai seperti pendidikan yang cukup, skill atau kemampuan teknis dan non teknis di pasar kerja yang cukup, serta seluruh potensinya tersalurkan dan terserap oleh pasar kerja.

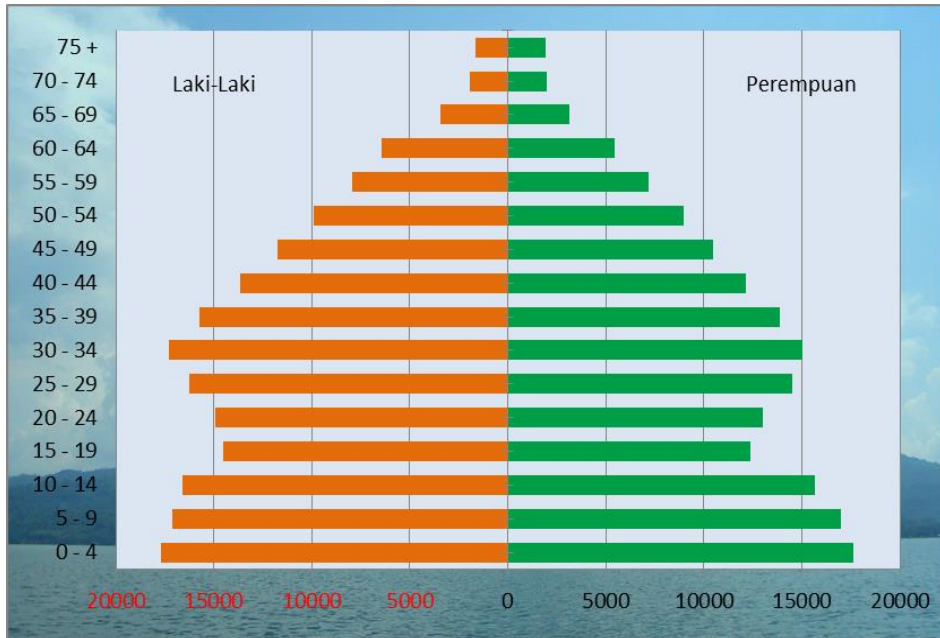
Melihat tren angka ketergantungan Kabupaten OKU Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, angka ketergantungan cukup fluktuatif yang berarti peningkatan penduduk usia produktif naik turun. Pembangunan manusia perlu ditingkatkan lagi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Melihat piramida penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019, penurunan angka ketergantungan ini lebih disebabkan berkurangnya penduduk usia tidak produktif pada umur 0-14 tahun akibat angka kelahiran yang mulai menurun dibanding tahun sebelumnya walaupun masih relatif tinggi sedangkan penambahan penduduk tua juga sangat sedikit. Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan jika pemerintah Kabupaten OKU Selatan mampu mengendalikan angka kelahiran penduduk, maka angka ketergantungan

ini dapat terus menurun akibat bertambahnya penduduk usia produktif dari penduduk muda dan penambahan penduduk tua (65+ tahun) yang belum banyak.

Perubahan demografi yang selalu mendapat perhatian dalam analisis kependudukan adalah perubahan struktur umur. Perubahan struktur umur ini umumnya merupakan akibat dari menurun atau bertambahnya tingkat fertilitas dan mortalitas. Keadaan struktur umur penduduk akan nampak lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk.

Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Bentuk piramida penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur serta oleh perpindahan penduduk. Penduduk dengan tingkat kelahiran tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Tingkat kelahiran yang rendah ditandai oleh bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya, sedangkan tingkat kelangsungan hidup dan tingkat perpindahan penduduk pada setiap kelompok umur akan mempengaruhi fluktuasi dalam piramida.

Gambar 3.4. Piramida Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Piramida penduduk Kabupaten OKU Selatan tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tingkat fertilitas Kabupaten OKU Selatan masih relatif tinggi walaupun sudah menurun dibanding tahun 2018. Hal ini ditunjukkan oleh alas piramida yang sangat lebar pada kelompok umur 0 - 4 tahun dan 5 - 9 tahun, dan untuk batang paling panjang berada pada kelompok umur 0-4 tahun. Berdasarkan piramida penduduk ini dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten OKU Selatan dapat digolongkan penduduk muda, yang berarti jumlah kelompok penduduk muda lebih banyak dari pada kelompok

penduduk tua. Dengan masih besarnya penduduk usia 0-4 tahun maka pelayanan kesehatan, sanitasi dan gizi untuk balita di Kabupaten OKU Selatan harus sangat diperhatikan. Terciptanya penduduk yang sehat diawali dengan terjaminnya kesehatan balita terutama bayi (0-11 bulan).

Selain itu, proporsi penduduk usia 5-9, 10-14, dan 15-19 pun sangat besar. Tentu penduduk usia ini memerlukan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan selain membangun kesehatan juga wajib memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia sekolah. Sistem pendidikan yang berkualitas menentukan masa depan penduduknya dan merupakan investasi jangka panjang. Pembangunan pendidikan meliputi sarana dan prasarana juga kualitas/mutunya. Sebaran sekolah-sekolah dan guru-guru mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas perlu terus diperhatikan agar dapat dijangkau masyarakat.

Sementara itu, penduduk yang tergolong pada kelompok umur 20-24, 25-29, hingga kelompok umur 60-64 tahun adalah penduduk yang memerlukan lapangan pekerjaan untuk membiayai kehidupan mereka. Salah satu komponen pembangunan manusia adalah kemampuan daya beli masyarakat atau kemampuan ekonomi. Bekerja adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hal lapangan pekerjaan, perlu sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah semaksimal mungkin menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta menciptakan iklim investasi

yang kondusif. Masyarakat dengan dibantu pemerintah terus meningkatkan kapasitasnya sehingga layak/memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan untuk penduduk yang termasuk kelompok umur 65 tahun ke atas atau yang termasuk dalam penduduk tua maka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan penduduk lansia. Jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua untuk para lansia mutlak diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimanapun, mereka adalah tetap kekayaan bangsa dan yang pasti kelak kita pun akan seperti mereka.

3.4. Pembangunan Sektor Kesehatan

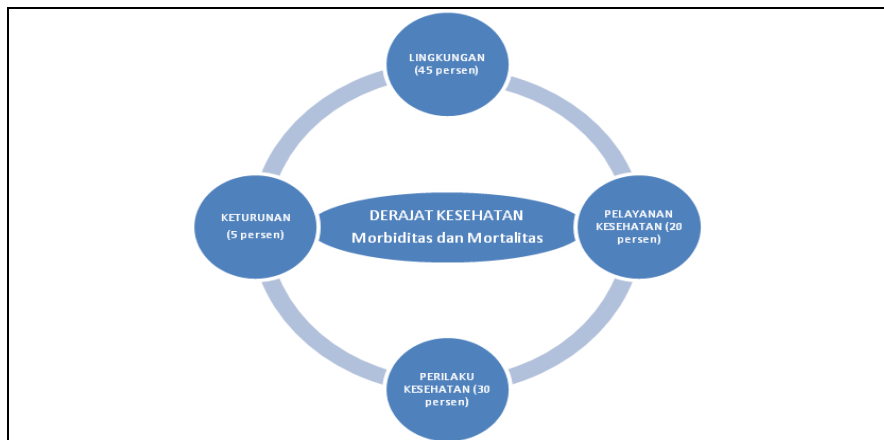
Indikator kesehatan dalam IPM adalah umur harapan hidup saat lahir. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, tetapi indikator ini merupakan cerminan dari banyak indikator *input*, proses, dan juga *output* kesehatan lainnya. Hal ini karena salah satu aspek terpenting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup saat lahir. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang

dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

3.4.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurut Henrik L. Blum (www.depkes.go.id) peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor-faktor lingkungan (45 persen), perilaku kesehatan (30 persen), pelayanan kesehatan (20 persen), dan keturunan/keturunan (5 persen).

Gambar 3.5 Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)

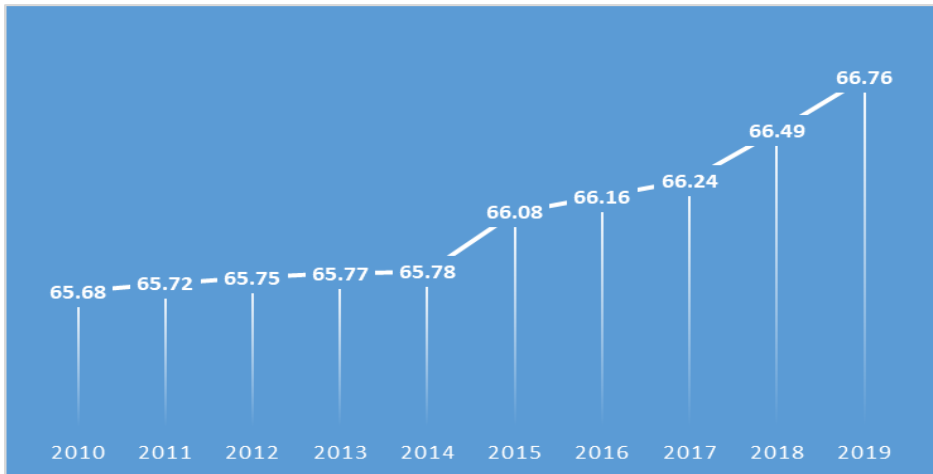


Sumber: www.depkes.go.id

Hubungan derajat kesehatan dengan keempat faktornya digambarkan Henrik L.Blum dalam Gambar 3.5. Berdasarkan teori tersebut faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Sepertinya memang sulit mewujudkan kehidupan yang sehat jika tinggal di lingkungan yang tidak sehat.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup dimaknai sebagai prediksi umur yang akan dimiliki bayi yang dilahirkan pada tahun bersangkutan untuk bertahan hidup. Meningkatnya angka harapan hidup bayi baru lahir mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. AHH memberikan banyak arti dalam kaitannya dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. AHH atau yang dikenal juga dengan istilah "*Life Expectancy At Birth*" merupakan rata - rata peluang hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.

Gambar 3.6 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019



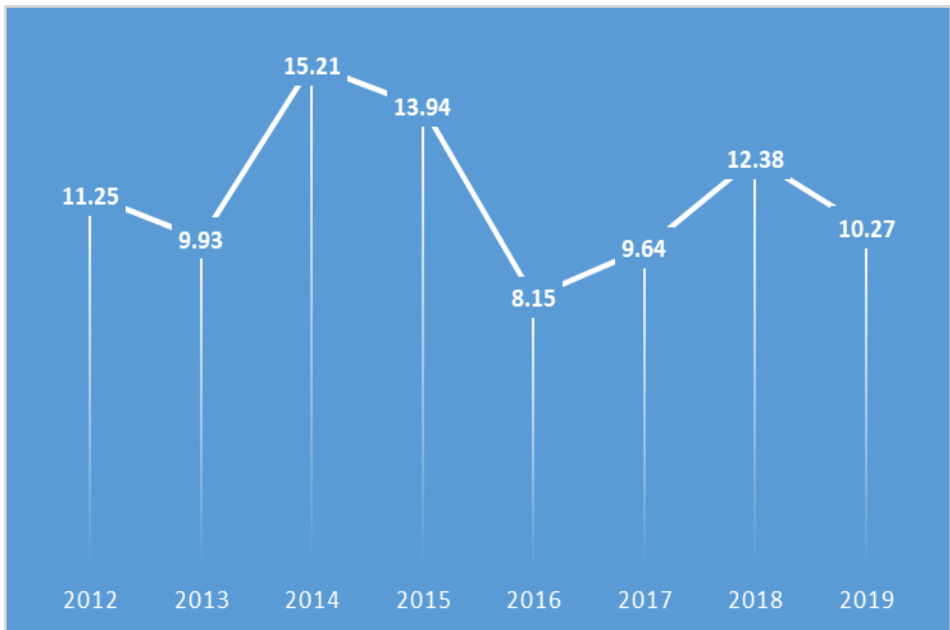
Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

AHH adalah *resultant* (hasil) dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi, usaha-usaha untuk meningkatkan AHH harus dilakukan secara simultan dan lintas sektor. Tidak ada kegiatan bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang menjadi prioritas sendirian karena semuanya penting dan berakhir pada peningkatan AHH. AHH yang tinggi dapat disebabkan oleh membaiknya standar pelayanan kesehatan medis, diet sehat rendah kalori, jenis pekerjaan yang rendah resiko kematian dan polusi, tingkat kemakmuran yang tinggi, dan rutinitas olahraga. Sebaliknya, hal-hal yang dapat memperpendek usia diantaranya kegemukan, merokok, stress dan kemiskinan.

Meningkatnya angka harapan hidup saat lahir mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, tahun 2010-2019, estimasi angka harapan hidup penduduk Kabupaten OKU Selatan terus meningkat walaupun kecil. Pada tahun 2010, angka harapan hidup penduduk mencapai 65,68 tahun dan meningkat menjadi 65,72 tahun pada tahun 2011. Dan pada tahun 2019 angka harapan hidup penduduk Kabupaten OKU Selatan menjadi 66,76 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup saat lahir seperti lingkungan , pelayanan kesehatan , keturunan dan perilaku masyarakat.

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

Gambar 3.7. Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2010-2019



Sumber: SUSENAS 2012-2019

Gambar 3.7 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada tahun 2012-2019 masih pluktuaktif (naik turun). Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 angka kesakitan di Kabupaten OKU Selatan terus menurun dari 28,96 persen menjadi 9,93 persen. Namun pada tahun 2014 naik menjadi 15,21 persen penduduk Kabupaten OKU Selatan yang terganggu kesehatannya. Begitu juga pada tahun 2015, angka kesakitan penduduk Kabupaten OKU Selatan masih di

atas 10 persen. Sedangkan pada tahun 2018 angka kesakitan naik menjadi 12,38 persen. Dan pada tahun 2019 angka ini turun lagi. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada tahun 2019 sebesar 10,27 persen. Penurunan angka kesakitan di Kabupaten OKU Selatan pada setahun terakhir tentu dapat mengindikasikan baiknya pembangunan kesehatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas penduduk dalam bekerja dan beraktivitas.

Gangguan kesehatan yang dialami penduduk merupakan hambatan dalam pembangunan manusia. Ketika penduduk sakit, maka ada beberapa hal yang hilang untuk menunjang kehidupan mereka seperti hilangnya produktivitas mereka dan beralihnya pengeluaran keuangan misalnya yang semula untuk meningkatkan pemenuhan nutrisi beralih menjadi untuk obat-obatan dalam rangka penyembuhan. Begitu juga dengan pihak pemerintah, yang semula anggaran bisa digunakan untuk peningkatan infrastruktur akan beralih ke pemenuhan sarana dan prasarana recovery kesehatan. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya serius dalam menciptakan masyarakat sehat seperti kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

3.4.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan puskesmas pembantu

merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok.

Tabel 3.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018-2019

| No. | Fasilitas Kesehatan | Jumlah | |
|-----|---------------------|--------|------|
| | | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rumah Sakit | 1 | 1 |
| 2 | Puskesmas | 19 | 19 |
| 3 | Puskesmas Pembantu | 44 | 23 |
| 4 | Balai Pengobatan | 6 | 3 |
| 5 | Poskesdes | 215 | 222 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan

Sampai dengan tahun 2019, Kabupaten OKU Selatan telah memiliki 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe C, 19 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan, 23 puskesmas pembantu, 3 balai pengobatan, dan 222 pos kesehatan desa (poskesdes). Berdasarkan data tersebut, walaupun Poekesdes bertambah namun keberadaan Poskesdes dirasa masih kurang mengingat dari 259 desa/kelurahan hanya 215 desa saja yang memiliki poskesdes.

Selain penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan petugas kesehatan seperti dokter dan bidan sangat penting guna melayani masyarakat

baik dalam hal pencegahan sebelum sakit (pemeliharaan kesehatan) maupun dalam hal penyembuhan ketika jatuh sakit.

Tabel 3.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019

| Tenaga Kesehatan Health Personnels | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Dokter Umum | 16 | 21 | 33 | 14 | 30 |
| Dokter Spesialis | 4 | 4 | 12 | 12 | 14 |
| Dokter Gigi | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Bidan | 422 | 290 | 313 | 203 | 311 |
| Bidan Desa | 240 | 244 | 252 | 252 | 281 |
| Perawat | 252 | 310 | 352 | 162 | 316 |
| Perawat Gigi | 8 | 0 | 15 | 2 | 11 |
| Farmasi | 20 | 10 | 18 | 8 | 20 |
| Ahli Gizi | 9 | 7 | 12 | 0 | 10 |
| Tukang Gigi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sanitarian | 32 | 16 | 21 | 0 | 21 |
| Lainnya | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan dokter di Kabupaten OKU Selatan sudah mulai mencukupi. Sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten OKU Selatan sudah ada 14 dokter spesialis dan 30 dokter umum. Jika dilihat dari kecenderungan tempat masyarakat berobat pada tahun 2019 sebagian besar masyarakat lebih memilih berobat ke praktek dokter/bidan dan poliklinik sedangkan mereka yang berobat jalan ke puskesmas/pustu cukup rendah hanya 6,8 persen.

Tabel 3.5. Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019

| No. | Fasilitas Kesehatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Rumah Sakit | 6,68 | 4,45 | 5,24 | 6,17 | 15,08 |
| 2 | Prakter Dokter/Bidan | 70,57 | 67,69 | 78,13 | 62,08 | 62,41 |
| 3 | Poliklinik/Praktek Dokter Bersama | 21,63 | 5,44 | 12,16 | 7,64 | 12,12 |
| 4 | Puskesmas/Pustu | 1,13 | 8,56 | 7,75 | 15,74 | 6,8 |
| 5 | Praktek Pengobatan Tradisional | 0,00 | 0,41 | 4,24 | 4,51 | 2,98 |
| 6 | Lainnya | 0,00 | 13,46 | 4,56 | 7,79 | 9,13 |

Sumber: *SUSENAS 2015-2019*

Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan, apakah rendahnya masyarakat berobat ke puskesmas/pustu akibat dari kurang maksimalnya pelayanan puskesmas/pustu atau memang masyarakat lebih memilih praktek dokter/bidan

poliklinik memang karena sebuah pilihan rasional seperti kemampuan finansial yang telah membaik.

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Tabel 3.6. Persentase Kelahiran Menurut Tenaga Penolong Persalinan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019

| No. | Penolong Kelahiran | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Dokter | 4,69 | 3,05 | 0,00 | 12,59 | 17,07 | 19,01 |
| 2 | Bidan | 60,45 | 79,51 | 71,80 | 73,05 | 66,57 | 59,47 |
| 3 | Nakes Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dukun | 33,71 | 17,44 | 28,15 | 9,18 | 15,18 | 19,35 |
| 5 | Famili/keluarga | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,17 | 2,18 |

Sumber: SUSENAS 2014-2019

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan sangat penting karena akan mengurangi risiko kematian baik kematian ibu maupun bayi nya. Sebenarnya tidak masalah proses melahirkan ditolong oleh dukun, akan tetapi harus dukun terlatih oleh tenaga kesehatan. Masyarakat Kabupaten OKU Selatan lebih memilih bidan sebagai penolong persalinan, hal ini dapat kita lihat dalam 6

(enam) tahun terakhir persalinan yang terjadi di Kabupaten OKU Selatan mayoritas ditolong oleh bidan. Pada tahun 2015 persalinan yang ditolong oleh bidan mencapai 79,51 persen sedangkan pada tahun 2016 menjadi sekitar 71,80 persen. Dan pada tahun 2019 persalinan yang ditolong bidan turun lagi menjadi 59,47 persen. Yang menggembirakan adalah meningkatnya persalinan yang ditolong oleh dokter. Pada tahun 2019, persalinan yang ditolong oleh dokter mencapai 19,01 persen. Seiring dengan naik turun nya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan tenaga kesehatan itu sendiri atau tingginya biaya persalinan. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten OKU Selatan adalah jaminan ketersediaan tenaga kesehatan terutama bidan di setiap desa yang senantiasa selalu siap dalam menolong persalinan juga jaminan biaya persalinan yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu.

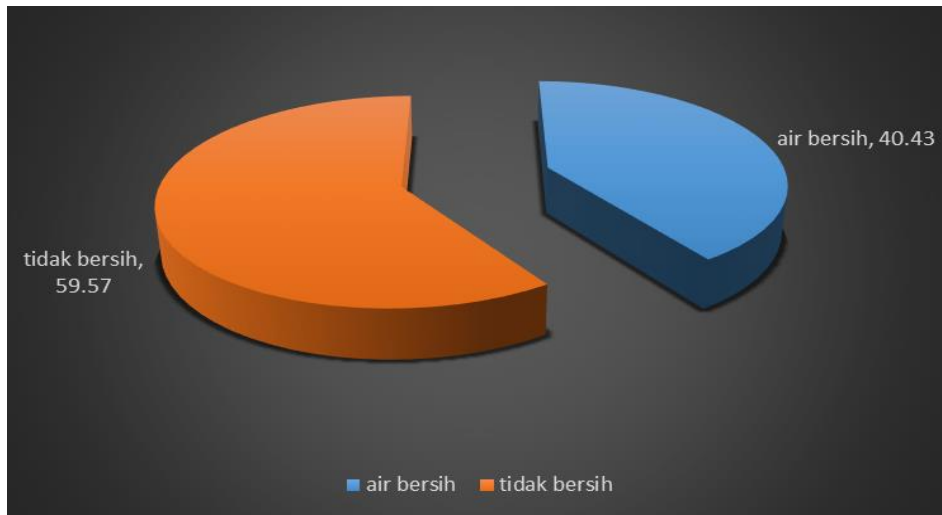
3.4.3. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Untuk mewujudkan penduduk yang sehat perlu sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh masyarakat serta penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang perilaku peduli kesehatan. Sementara itu, hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menciptakan lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat selain dengan

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pangan dan sandang juga dengan menciptakan sanitasi yang baik.

Penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk memasak dan MCK sangat penting sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Yang dimaksud air bersih sendiri adalah air yang berasal dari ledeng, air kemas, dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 meter. Pemerintah terus berupaya dalam penyediaan air bersih ini dengan membangun fasilitas air bersih melalui berbagai program seperti PAMSIMAS.

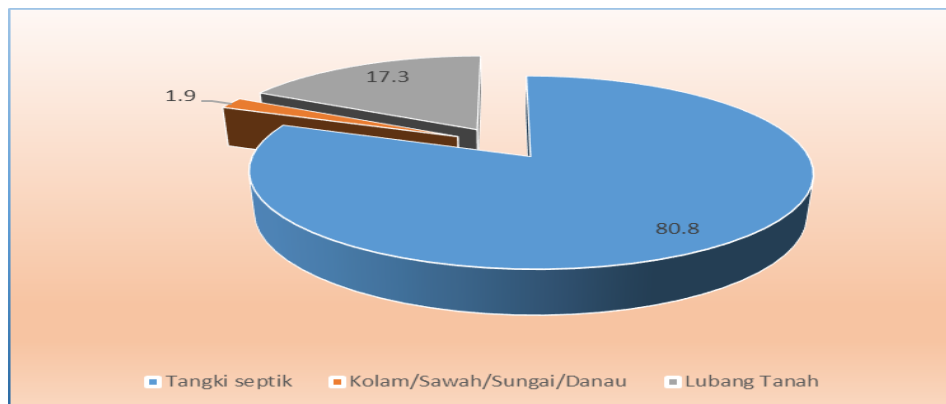
Gambar 3.8. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019



Sumber: SUSENAS 2019

Sampai dengan tahun 2019, masih banyak rumah tangga di Kabupaten OKU Selatan belum menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga yang telah menggunakan air bersih hanya mencapai 40,43 persen saja. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Ada dua faktor penyebab rendahnya penggunaan air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten OKU Selatan, yang pertama yaitu sulitnya akses terhadap air bersih dan yang kedua adalah tingkat pengetahuan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus terus mengupayakan program penyediaan dan pemerataan sarana air bersih juga sekaligus penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang air bersih serta perubahan kebiasaan dalam penggunaan air.

Gambar 3.9. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Sehat Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019



Sumber: SUSENAS 2019

Selain penggunaan air bersih, bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan tidak buang air (besar/kecil) sembarangan. Penggunaan jamban yang sehat merupakan bagian dari menciptakan sanitasi yang sehat yang akan mengurangi penyebarluasan berbagai penyakit. Jamban yang sehat adalah jamban/kakus yang digunakan oleh rumah tangga dengan kloset leher angsa serta dilengkapi tangki pembuangan/tangki septik.

Pada tahun 2019, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten OKU Selatan sudah menggunakan jamban yang sehat. Rumah tangga yang telah menggunakan jamban sehat sudah mencapai 80,8 persen saja. Akan tetapi masih banyak penduduk yang buang air besar sembarangan seperti di sungai/kebun atau jamban hanya berupa cubluk. Hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih menganggap remeh dampak dari buang air sembarangan. Oleh karena itu pemerintah harus terus mengupayakan penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya jamban yang sehat.

3.5. Pembangunan Sektor Pendidikan

Keunggulan suatu bangsa tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Secara umum pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menambah ilmu pengetahuannya. Dalam hal ini dapat dicapai melalui bangku sekolah. Tujuan

pembangunan dalam bidang pendidikan adalah tersedianya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan/pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan/pengembangan wilayah tersebut. SDM berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menunjang pembangunan sedangkan pembangunan dapat menunjang pendidikan (pembinaan, penyediaan sarana dan seterusnya). Seringnya terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesadaran para ahli-ahli dan pakar dari berbagai kalangan bahwa kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan setidaknya tergantung pada taraf pendidikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan dalam upaya melaksanakan pembangunan yaitu pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan masyarakat dan meningkatkan rasionalitas pemikiran mereka; pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mempelajari pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin, menjalankan

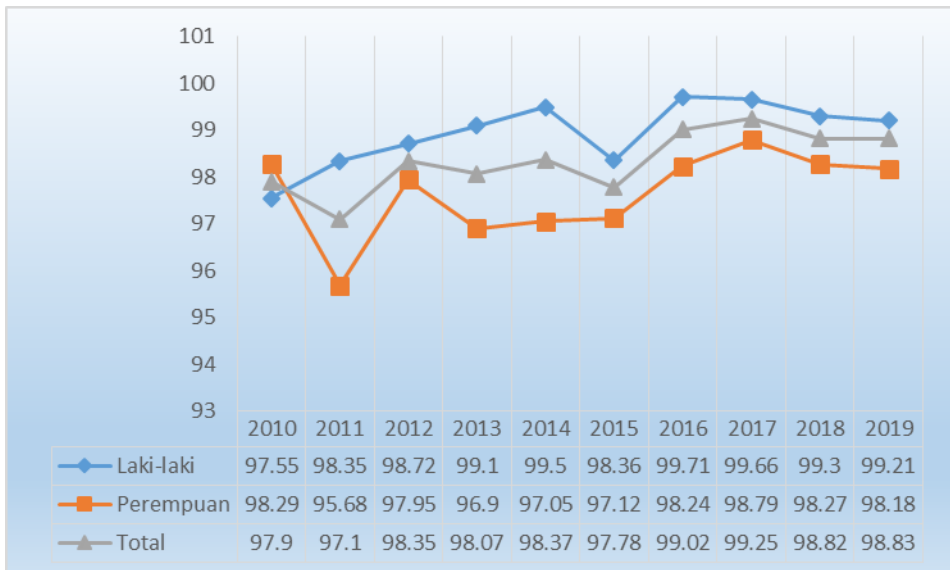
perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan modern lainnya; pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan dapat menjadi perangsang untuk melaksanakan pembaharuan di berbagai bidang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan program Pendidikan Gratis untuk seluruh masyarakat Sumsel, tidak terkecuali di Kabupaten OKU Selatan. Hal ini disadari bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak di Sumatera Selatan dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain faktor kemiskinan keluarga. Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain program pendidikan gratis, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan perbaikan kurikulum, itu semua dalam rangka mencapai terlaksananya program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

3.5.1. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya.

Gambar 3.10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan

Persentase penduduk yang melek huruf di Kabupaten OKU Selatan setiap tahunnya berfluktuasi walaupun trennya cenderung meningkat. Angka

melek huruf penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Pada tahun 2018, angka melek huruf penduduk Kabupaten OKU Selatan turun menjadi 98,82 dibanding tahun sebelumnya hal ini berarti ada pengurangan penduduk yang melek huruf baik adanya migrasi keluar ke Kabupaten OKU Selatan usia 15 tahun dan melek huruf. Sedangkan pada tahun 2019 angka melek huruf naik menjadi 98,23 persen.

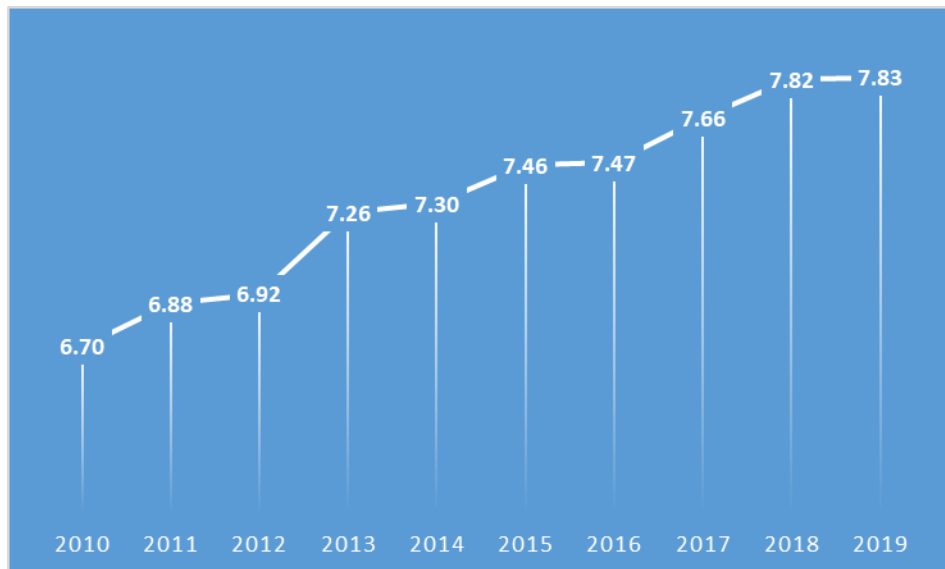
Melek huruf merupakan dampak dari suatu proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah) maupun informal (di luar sekolah). Dengan melek huruf maka segala informasi dapat diterima dengan baik sehingga akan mempengaruhi sudut pandang dan pola berpikir dan dapat memberikan kontribusi nyata pada kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dapat menerima informasi dengan baik akan memiliki banyak pengetahuan sehingga memberikan banyak peluang dan juga dapat terarah segala kegiatannya. Oleh karena itu, mewujudkan masyarakat yang melek huruf menjadi tujuan dari pembangunan di bidang pendidikan.

3.5.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini menjadi sangat penting karena indikator ini juga dijadikan indikator penyusun IPM yang menggunakan metode baru. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Gambar 3.11. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten OKU Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 telah mencapai 7,66 tahun dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 7,82 tahun dan terus naik secara perlahan mencapai 7,83 pada tahun 2019 yang artinya rata-rata penduduk bersekolah sampai tingkat SMP kelas 2. Tentu saja untuk program Wajib Belajar 12 tahun

angka ini masih terlalu jauh apalagi kalau kita melihat program dunia (UNDP) bahwa setiap penduduk harus menyelesaikan pendidikan selama 15 tahun yang berarti minimal mengenyam pendidikan sampai tingkat Diploma III, maka penduduk Kabupaten OKU Selatan masih jauh dari target dunia.

3.5.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari ijazah formal yang dimiliki. Jika kita perhatikan tabel 3.7, penduduk OKU Selatan 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD mengalami peningkatan sedikit dan juga diikuti oleh menurunnya persentase penduduk yang tamat SD/ sederajat. Begitu juga penduduk yang tamat SMP mengalami penurunan sedangkan mereka yang tamat SMA di Kabupaten OKU Selatan mengalami kenaikan. Penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi mengalami penurunan juga. Perubahan struktur pendidikan penduduk setiap tahun dapat terjadi secara dinamis mengingat dinamika penduduk banyak yang mempengaruhinya seperti migrasi.

Tabel 3.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2019

| No. | Ijazah yang dimiliki | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tdk punya ijazah SD | 14,07 | 14,65 | 12,50 | 13,22 | 16,39 |
| 2 | SD Sederajat | 39,91 | 45,67 | 40,59 | 38,21 | 35,71 |
| 3 | SMP Sederajat | 26,06 | 18,93 | 24,68 | 25,52 | 21,96 |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | SMA Sederajat | 15,66 | 17,06 | 16,98 | 16,66 | 21,23 |
| 5 | Perguruan Tinggi | 4,31 | 3,69 | 5,24 | 6,39 | 4,71 |

Sumber: SUSENAS 2015-2019

Penduduk yang tamat SMA sederajat meningkat pada tahun 2019 dapat dimungkinkan karena pengaruh dari kembalinya penduduk yang tamat SMA karena gagal atau di PHK dari tempat kerja. Dari tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan masyarakat Kabupaten OKU Selatan masih belum menggembirakan.

3.5.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Tetapi kelemahannya, APS tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/nikmati pendidikan.

Tabel 3.8. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019

| No. | Kelompok Umur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 7-12 | 100,00 | 98,57 | 100,00 | 100,00 | 99,70 | 99,74 |
| 2 | 13-15 | 91,60 | 94,53 | 90,21 | 91,76 | 92,00 | 91,39 |
| 3 | 16-18 | 66,78 | 61,75 | 70,84 | 69,34 | 70,65 | 69,41 |

Sumber: SUSENAS 2014-2019

Tabel 3.8 menunjukkan semakin tinggi umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD) pada tahun 2019 naik menjadi 99,74 persen. Hal ini berarti masih ada anak usia 7-12 tahun tidak bersekolah. Pada tahun 2019 untuk kelompok umur 13-15 tahun (usia SLTP), angka partisipasi sekolah turun menjadi 91,39 persen dibandingkan pada tahun 2018. Dan pada kelompok umur 16-18 tahun (usia SMA), pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah turun menjadi 69,41 persen.

Lebih jauh tentang partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni yaitu tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Angka Partisipasi Murni (APM) mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang

tersebut (bersekolah tepat waktu). Tetapi APM memiliki kelemahan tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5 – 6 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah di SD/Sederajat. Inpres no 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWBA) mempunyai target: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat minimal 95 persen pada akhir tahun 2008; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat minimal 95 Persen akhir tahun 2008; serta persentase buta aksara 15 tahun ke atas maksimum 5 persen pada akhir tahun 2009.

Tabel 3.9. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019

| No. | Jenjang Pendidikan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | SD | 98,53 | 96,20 | 99,33 | 99,72 | 99,70 | 99,21 |
| 2 | SMP | 77,96 | 86,99 | 85,12 | 83,48 | 79,75 | 78,67 |
| 3 | SMA | 61,05 | 50,85 | 63,33 | 61,04 | 61,07 | 60,96 |

Sumber: *SUSENAS 2014-2019*

APM SD dari tahun 2014-2019 di Kabupaten OKU Selatan cenderung selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 APM SD Kabupaten OKU Selatan turun menjadi sebesar 99,21 persen. APM SD sebesar 99,21 persen artinya sebanyak 99 persen anak usia SD dapat mengenyam pendidikan

pada jenjang SD. Tingginya APM SD ini bisa disebabkan karena semakin ketatnya sekolah-sekolah menerapkan aturan batas minimal masuk kelas 1 (satu) SD di usia 7 tahun. Sementara itu, APM SMP cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga 2019 begitu juga dengan APM SMA. Yang patut diperhatikan adalah APM SMA karena nilainya masih sangat rendah padahal pemerintah telah menetapkan program wajib belajar (WAJAR) 12 tahun.

Selain angka partisipasi murni (APM), masih ada indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi pendidikan di suatu daerah yaitu angka partisipasi kasar (APK). APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan secara umum disuatu daerah pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Atau bisa juga disebabkan oleh adanya anak yang bersekolah di Kabupaten OKU Selatan akan tetapi domisilinya di luar OKU Selatan, seperti dari Kabupaten OKU atau OKU Timur.

Tabel 3.10. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014-2019

| No. | Jenjang Pendidikan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | SD | 111,10 | 115,36 | 117,57 | 112,00 | 111,45 | 112,19 |
| 2 | SMP | 85,31 | 102,08 | 93,75 | 92,17 | 86,44 | 86,65 |
| 3 | SMA | 71,43 | 60,78 | 74,31 | 75,09 | 84,94 | 75,21 |

Sumber: *SUSENAS 2014-2019*

Berdasarkan tabel 3.10, APK SD di Kabupaten OKU Selatan dari tahun 2014-2019 selalu mengalami fluktuasi dan selalu diatas 100 persen. Pada tahun 2018 APK SD-nya sebesar 111,45 persen sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 112,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah yang belum mencukupi umur atau sudah melebihi umur yang seharusnya pada jenjang pendidikan SD. Selain itu, APK di atas 100 persen juga dapat mengindikasikan adanya penduduk kabupaten lain yang berada di perbatasan yang bersekolah di Kabupaten OKU Selatan.

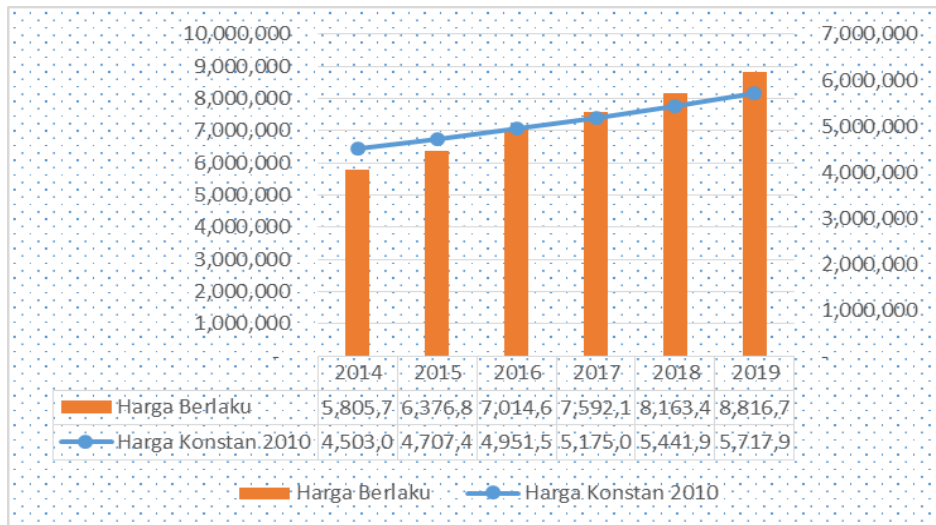
Untuk jenjang SMP, APK SMP Kabupaten OKU selatan pada tahun 2019 naik menjadi sebesar 86,65 persen sedangkan untuk jenjang SMA, APK Kabupaten OKU Selatan mengalami penurunan pada tahun 2019. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa, APK SD selalu lebih tinggi daripada APK SMP dan SMA dari tahun ke tahun dan begitupun APK SMP selalu lebih tinggi dari APK

SMA. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan secara umum pada jenjang yang lebih tinggi semakin menurun sehingga perlu perhatian khusus bagaimana pemerintah Kabupaten OKU Selatan dapat menjamin terlaksananya WAJAR 12 tahun dapat dinikmati oleh seluruh penduduk yang usianya bersesuaian.

3.6. Pembangunan Sektor Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator di antara nya adalah laju pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, laju inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). PDRB selain sering dipakai sebagai indikator kemakmuran suatu daerah juga merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Selama beberapa tahun terakhir, PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 nilai yang terbentuk sebesar 6.376,85 miliar rupiah. Pada tahun 2016, angka ini meningkat menjadi 7.014,61 miliar rupiah dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 7.592,14 miliar rupiah. Terakhir pada tahun 2018, angka ini meningkat menjadi 8.163,45 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 8.816,70 miliar.

Gambar 3.12 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2014-2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Berdasarkan harga berlaku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 31,00 persen, sedikit menurun dibanding kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 31,76 persen. Sebaliknya, sektor yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari 21,85 persen di tahun 2018 menjadi 22,79 di tahun 2019. Sektor lainnya yang mengalami peningkatan kontribusi antara lain sektor industri pengolahan, sektor real estat, dan sektor penyediaan

akomodasi dan makan minum. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 mengalami sedikit perlambatan, yaitu dari 5,16 persen pada tahun 2018 menjadi 5,07 persen pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, antara lain sektor jasa pendidikan, konstruksi, jasa perusahaan, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Berdasarkan PDRB menurut jenis pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada tahun 2019, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah 67,46 persen. Kontribusi terendah adalah dari ekspor barang dan jasa yaitu minus 15,97 persen.

Dalam pembangunan di bidang ekonomi, bukan hanya berbicara tentang masalah pertumbuhan ekonomi saja. Hal ini karena pembangunan perekonomian di suatu daerah merupakan masalah yang kompleks dan menyeluruh. Pembangunan ekonomi juga harus mampu memberdayakan masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja

yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian daerah tersebut.

Permasalahan lain dalam bidang ekonomi adalah mengurangi banyaknya orang menganggur. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali karena putus asa, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu daerah. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk pengangguran. Tingginya TPT menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah 200.358 orang, dengan komposisi 194.367 bekerja dan 5.991 pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran pada tahun 2019 adalah 2,99 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 76,92 persen.

Jika dilihat menurut sector lapangan usaha, sektor Pertanian merupakan sektor yang menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak di tahun 2019 yaitu sebesar 148.124 pekerja atau 76,21 persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu.

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 sebanyak 1.206 pekerja dengan komposisi 630 pekerja laki-laki dan 576 pekerja perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir SMA sederajat yaitu sebesar 83,75 persen dari jumlah pencari kerja.

Tabel 3.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2019

| Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Angkatan Kerja | 124 621 | 75 737 | 200 358 |
| Bekerja | 121 802 | 72 565 | 194 367 |
| Pengangguran Terbuka | 2 819 | 3 172 | 5 991 |
| Bukan Angkatan Kerja | 13 211 | 46 906 | 60 117 |
| Sekolah | 8 234 | 8 363 | 16 597 |
| Mengurus Rumah Tangga | 1 056 | 36 364 | 37 420 |
| Lainnya | 3 921 | 2 179 | 6 100 |
| Jumlah | 137 832 | 122 643 | 260 475 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 90,42 | 61,75 | 76,92 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tingkat Pengangguran | 2,26 | 4,19 | 2,99 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Setelah ditelusuri, mayoritas angkatan kerja di Kabupaten OKU Selatan bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar yakni mencapai 31,28 persen.

Tabel 3.12. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

| Status Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Berusaha sendiri | 21.02 | 6.88 | 15.74 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar | 43.28 | 11.13 | 31.28 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 3.58 | 1.27 | 2.71 |
| Buruh/karyawan/pegawai | 9.70 | 12.38 | 10.70 |
| Pekerja bebas | 7.68 | 4.16 | 6.37 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar | 14.75 | 64.18 | 33.20 |
| Jumlah | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Sedangkan yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh hanya 10,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja formal di Kabupaten OKU Selatan sangat sedikit dan perekonomian Kabupaten OKU Selatan digerakkan lebih besar oleh sektor informal. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten OKU Selatan merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduk bekerja di pertanian rakyat.

Tabel 3.13. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

| Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin/Sex | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pertanian | 78.08 | 73.06 | 76.21 |
| Industri | 5.19 | 0.44 | 3.42 |
| Jasa | 16.73 | 26.50 | 20.38 |
| Jumlah/Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Berdasarkan Tabel di atas, mayoritas penduduk Kabupaten OKU Selatan bekerja di sektor pertanian mencapai 76,21 persen. Adapun sektor industry hanya sebesar 3,42 persen. Sektor jasa menjadi yang terbesar kedua

yakni sebesar 20 persen lebih disebabkan oleh sektor jasa-jasa pemerintah seperti jasa pendidikan melalui sekolah-sekolah, jasa kesehatan melalui fasilitas kesehatan, dan jasa pemerintahan mulai dari pemerintahan desa /kelurahan hingga pemerintahan kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten OKU Selatan perlu lebih memperhatikan pertanian. Bagaimana pertanian di Kabupaten OKU Selatan dapat lebih maju baik maju budidaya tanamannya, maju pengolahannya, maju pemasarannya, dan maju pula kesejahteraan petaninya. Apalagi jika dibandingkan dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten OKU Selatan, dimana kontribusi pertanian yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 31,00 persen padahal yang bekerja di sektor pertanian mencapai 76 persen lebih. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pertanian di Kabupaten OKU Selatan sangat rendah, dikerjakan oleh orang banyak dan memakan waktu yang lama akan tetapi outputnya kecil. Sehingga menjadi tugas berat pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian ini.

3.7. Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD \$1/hari Kemiskinan banyak dihubungkan dengan beberapa hal berikut diantaranya:

- penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
- penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
- penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
- penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
- penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ada tiga

kebijakan yang saat ini mempengaruhi perhatian pemerintah daerah terhadap kemiskinan; (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengemban ‘fungsi-fungsi wajib’ termasuk untuk menyediakan layanan umum bagi masyarakat yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, (2) gerakan nasional untuk mengembangkan dan melaksanakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) membutuhkan partisipasi dari pemerintah kabupaten/kota, (3) program-program bantuan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi kerentanan ekonomi yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu langkah pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh sejauh mana perhatian pemerintah kabupaten/kota itu sendiri misalnya dengan menciptakan desa-desa mandiri yang sejahtera untuk menjaga kelangsungan finansial mereka. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 167 menyatakan bahwa “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaringan sosial.

Dalam rangka SPK dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dipimpin langsung Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota, Provinsi maupun nasional. Pemerintah Provinsi maupun

kabupaten/kota juga memperoleh dana alokasi umum yang sebanding dengan tingkat kemiskinan di daerahnya. Berbagai subsidi juga telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi beban penduduk miskin. Dalam konteks regional kabupaten/kota beberapa program pemerintah kabupaten/kota secara langsung juga ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Namun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi kendala, khususnya untuk mengembangkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan lokal dan menyalurkan sumber daya secara efisien.

Dalam mengukur kondisi kemiskinan di suatu wilayah ada banyak indikator yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan suatu hal yang kompleks yang dipengaruhi dan memengaruhi banyak hal. Oleh sebab itu, wajar saja jika ingin melihat kondisi kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya memperhatikan satu indikator-indikator tertentu. Namun, diantara banyak indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan ada beberapa indikator yang biasanya di gunakan sebagai indikator utama tentang kemiskinan. Indikator tersebut ialah persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin (P0) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan suatu wilayah terhadap jumlah seluruh penduduk di wilayah tersebut dalam waktu tertentu yang dinyatakan

dalam persentase. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak dalam persen penduduk miskin di suatu wilayah.

Dengan memperhatikan persoalan kemiskinan serta tingkat kemiskinan yang ada, beban dan tantangan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten OKU Selatan sangatlah besar. Walaupun dari tahun ke tahun, secara umum, terjadi penurunan persentase penduduk miskin namun penurunan yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten OKU Selatan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 10,53 persen. Angka kemiskinan ini menurun sedikit disbanding tahun sebelumnya yakni sebesar 10,64 persen. Penurunan angka kemiskinan menjadi sangat penting karena merupakan indikator capaian kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyat juga berarti terjadi perbaikan taraf hidup masyarakat.

Tabel 3.14. Persentase penduduk miskin Kabupaten OKU Selatan tahun 2012-2019

| Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk (ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
|-------|---|------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2012 | 224 039 | 34,70 | 10,49 |
| 2013 | 235 288 | 38,90 | 11,57 |
| 2014 | 240 610 | 38,18 | 11,21 |

| | | | |
|------|---------|-------|-------|
| 2015 | 247 779 | 40,63 | 11,58 |
| 2016 | 273 594 | 38,42 | 10,95 |
| 2017 | 286 157 | 38,63 | 10,98 |
| 2018 | 310 717 | 37,87 | 10,64 |
| 2019 | 319 333 | 37,92 | 10,53 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan

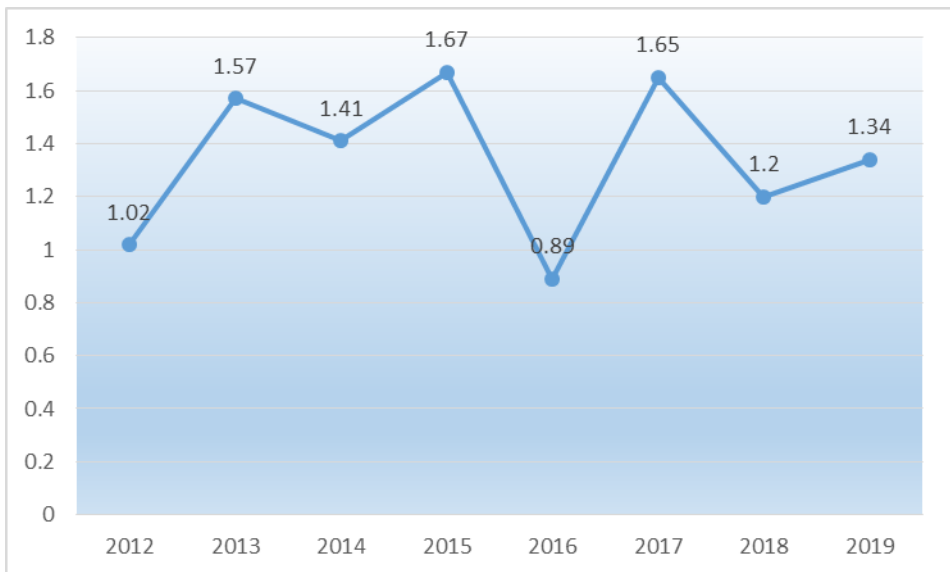
Secara umum, apabila dilihat dalam tren tingkat kemiskinan dari tahun 2012 sampai 2019 terlihat bahwa pemerintah sesungguhnya telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari pada gambar diatas. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan. Di tahun-tahun tertentu memang persentase penduduk miskin pernah mengalami peningkatan. Misal ditahun 2013 dan tahun 2015. Pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase penduduk miskin yakni sebesar 10,53. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk terus aktif dan hati-hati dalam memantau dan menanggulangi kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan juga dapat dilihat dari penurunan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan. Ukuran ini juga merupakan ukuran yang penting dalam melihat kondisi kemiskinan di suatu daerah. Indeks

kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan nilai rata-rata kesenjangan (gap) pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar Indeks kedalaman kemiskinan atau rata-rata kesenjangan ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin masih jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan.

Gambar 3.13. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan

Selama periode 2012 - 2019, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan walaupun tidak selalu konsisten. Pada tahun 2012, nilai indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,02 persen dan nilai tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga menjadi 1,67 persen pada tahun 2015, dan turun lagi menjadi 0,89 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten OKU Selatan sebesar 1,65. Angka ini meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,20 lalu naik lagi menjadi 1,34 pada tahun 2019. Kenaikan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran dan konsumsi penduduk miskin cenderung menurun dan menjauhi nilai garis kemiskinan. Yang artinya semakin jauh tenggelam dalam kemiskinan. Ini harus jadi bahan pertimbangan pemerintah agar terus memperbaiki sasaran kebijakan penanggulangan kemiskinan dan membuat kebijakan anti kemiskinan yang radikal pada tahun-tahun selanjutnya.

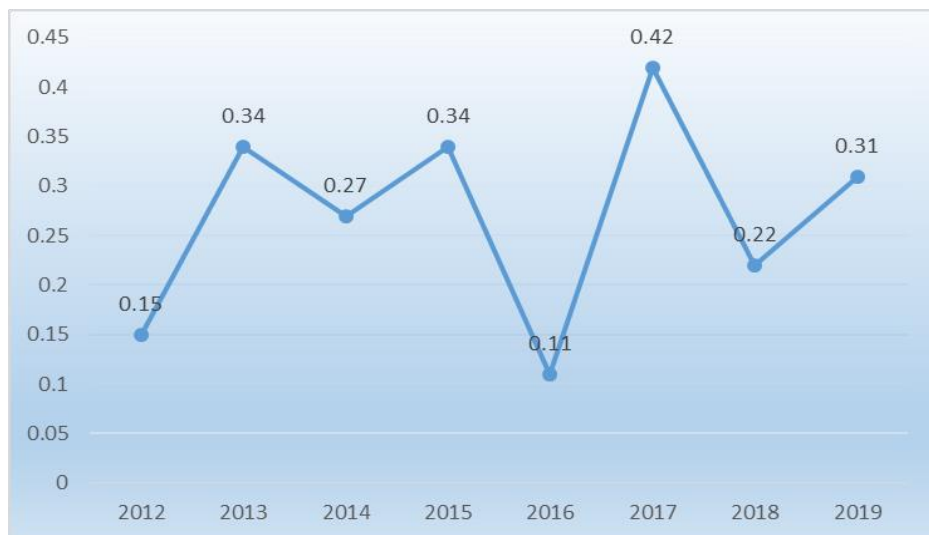
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran penyebaran di antara penduduk miskin atau dapat menggambarkan intensitas kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ini juga menunjukkan kuadrat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini memberikan bobot lebih tinggi bagi mereka yang jauh berada di bawah garis kemiskinan.

Perbaikan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan bagi mereka yang benar-benar miskin

Tingkat kemiskinan juga dapat dilihat dari nilai indeks keparahan kemiskinan, yaitu sebesar 0,31 poin pada tahun 2019. Nilai ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,22 poin. Kenaikan nilai ini menunjukkan bahwa variasi dan ketimpangan (gap) pengeluaran rumah tangga penduduk miskin cenderung lebih heterogen. Kecenderungan kenaikan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di OKU Selatan semakin bertambah.

Gambar 3.14. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan

Walaupun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan termasuk lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Dari indikator persentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin di Kabupaten OKU Selatan merupakan yang terendah ketiga setelah Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Timur jika dibanding kabupaten/kota di Sumatera Selatan.



<https://disbudpar.okuselatankab.go.id>

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia (masyarakat). Di antara berbagai pilihan, yang terpenting yaitu berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

4.1. Dimensi Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu indikator penyusun IPM untuk melihat tingkat kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini didasari pemikiran bahwa hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Sehingga untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kondisi kesehatan penduduk tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi derajat kesehatannya dan dari sisi status kesehatannya. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui berbagai macam indikator salah satunya adalah angka harapan hidup (AHH) yang merupakan indikator penting dalam penghitungan IPM.

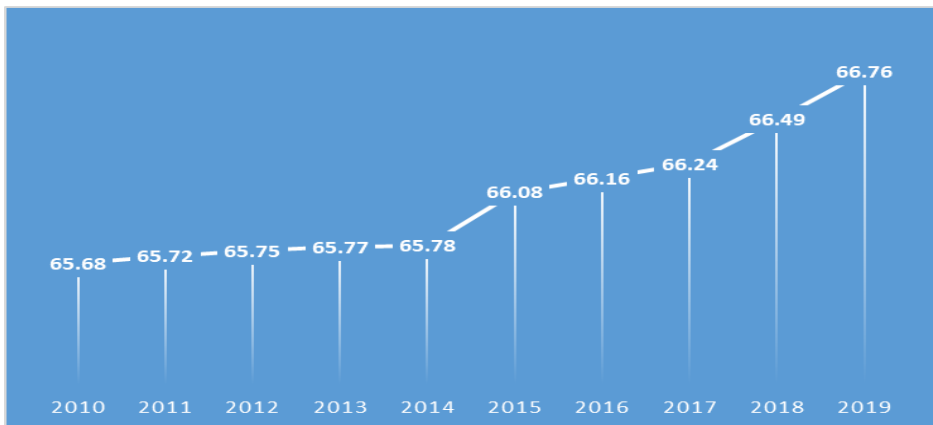
AHH memberikan banyak arti dalam kaitannya dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. AHH atau yang dikenal juga dengan istilah "*Life Expectancy At Birth*" merupakan rata - rata peluang hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. AHH adalah resultant (hasil) dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi, usaha-usaha untuk meningkatkan AHH harus dilakukan secara simultan dan lintas sektor. Tidak ada kegiatan bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang menjadi

prioritas sendirian karena semuanya penting dan berakhir pada peningkatan AHH. AHH yang tinggi dapat disebabkan oleh membaiknya standar pelayanan kesehatan medis, diet sehat rendah kalori, jenis pekerjaan yang rendah resiko kematian dan polusi, tingkat kemakmuran yang tinggi, dan rutinitas olahraga. Sebaliknya, hal-hal yang dapat memperpendek usia diantaranya kegemukan, merokok, stress dan kemiskinan. AHH yang rendah di suatu daerah harus diatasi di antara nya dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan

Peningkatan derajat kesehatan juga dapat dilakukan melalui perbaikan mutu lingkungan hidup atau pemukiman yang dapat mendukung hidup sehat, salah satunya adalah kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Indikator yang menjadi acuan kualitas antara lain tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Dari gambar berikut, AHH di Kabupaten OKU Selatan dari tahun ke tahun sejak 2010-2018 cenderung selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk di kabupaten ini selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi pun dapat dikatakan linear dan semakin baik. Artinya setiap tahun harapan hidup seorang bayi yang lahir di Kabupaten OKU Selatan selalu meningkat. Harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2019 akan lebih lama daripada tahun-tahun

sebelumnya dan begitu seterusnya hingga pada tahun 2019 besar AHH di Kabupaten OKU Selatan telah mencapai 66,76 tahun.

Gambar 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Artinya bayi yang baru lahir di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2019 rata-rata memiliki kesempatan untuk hidup sampai umur 67 tahun. Secara umum besaran AHH tersebut sangat tergantung pada angka kematian bayi (*perinatal*, *neonatal* dan *post-neonatal mortality*), angka kematian balita, angka kematian menurut kelompok umur, dan angka kematian ibu.

4.2. Dimensi Pendidikan

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Pembangunan manusia yang masih terus berlangsung hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Akan tetapi, monitoring terhadap kinerja pembangunan di bidang pendidikan harus tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan dan langkah ke depan.

Pendidikan ataupun pengetahuan merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam pembangunan manusia. Kinerja pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ataupun pengetahuan dari manusia tersebut. Sehingga pendidikan akan memperluas peluang seseorang dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena

itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

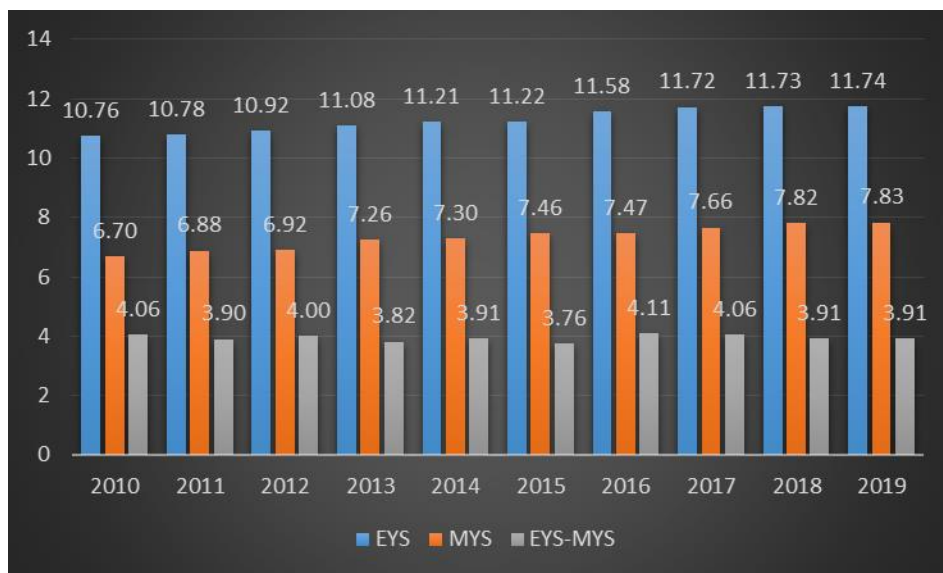
Sejalan dengan itu, keberhasilan suatu bangsa di ajang internasional tidak lagi ditentukan oleh keunggulan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi lebih ditentukan oleh keunggulan kompetitif, yang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi instrumen yang sangat penting. Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas dan berdaya guna bagi pembangunan.

Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam pembentukan IPM terdapat dua indikator yang digunakan dalam membentuk dimensi pendidikan yakni harapan lama sekolah (HLS) dan rata rata lama sekolah usia 25 tahun keatas (RLS). Dilihat dari indikator HLS, dari tahun 2010-2019 HLS di Kabupaten OKU Selatan selalu mengalami peningkatan. HLS

2019 mencapai angka sebesar 11,74 tahun dan hanya naik 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Artinya, anak di Kabupaten OKU Selatan pada umur 7 tahun diharapkan dapat merasakan lamanya sekolah selama sekitar 11-12 tahun lebih di masa mendatang.

Gambar 4.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25+ Kabupaten OKU Selatan tahun 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari indikator pendidikan lain yang membentuk dimensi pendidikan dalam IPM, rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten OKU Selatan juga selalu mengalami

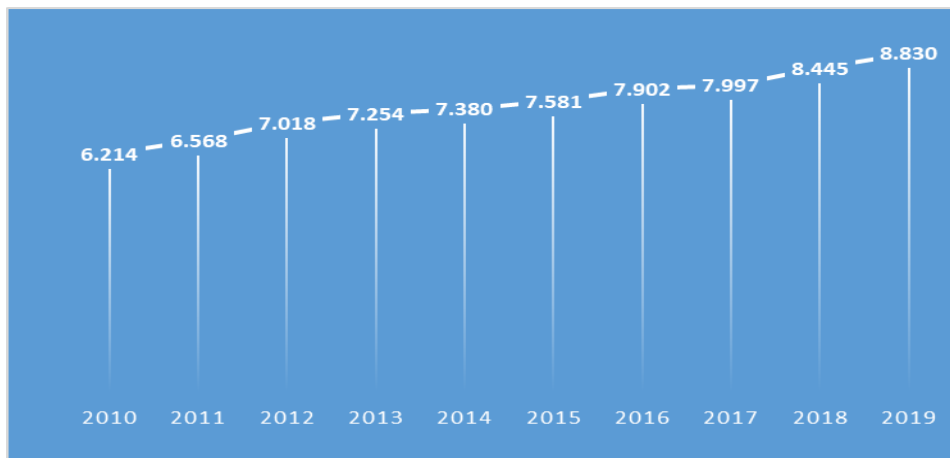
peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010 sampai 2019. Pada tahun 2010 RLS hanya sebesar 6,70 namun terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,47 dan sebesar 7,83 tahun di 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penduduk yang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten OKU Selatan telah menempuh pendidikan formal sekitar 7 tahun lebih. Hal ini berarti bahwa masih banyak penduduk usia 25 tahun keatas yang sekolah hanya sampai jenjang SMP. Pemerintah harus terus memberikan perhatian khusus pada peningkatan indikator ini dengan melaksanakan program-program peningkatan tingkat pendidikan untuk penduduk usia 25 tahun keatas. Biasanya penduduk yang berpendidikan rendah banyak terdapat didaerah perdesaaan yang sulit dalam mengakses pendidikan.

4.3. Dimensi Ekonomi

Peningkatan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia. Dimensi monitoring yang dicakup dalam bidang ekonomi juga mirip seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Dimensi ekonomi dalam IPM dicerminkan dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan variabel yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang-barang dan jasa. Tingkat daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain : pendapatan, pengeluaran konsumsi, indeks

harga konsumen dan indeks kemahalan. Oleh karena itu pendapatan yang tinggi belum menjamin daya beli masyarakat yang tinggi pula. Faktor inflasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan seberapa riil nilai uang yang dimiliki masyarakat, artinya seberapa mampu masyarakat membelanjakan dengan uang yang dipegangnya. Jika dilihat kemampuan membeli barang dan jasa (daya beli) antar wilayah maka daya beli itu sendiri merupakan sesuatu yang relatif, artinya pertanyaan ‘apakah daya beli masyarakat suatu wilayah lebih baik dari daya beli masyarakat di wilayah lain’, maka faktor relatif-nya daya beli tersebut melatarbelakangi perhitungan indeks kemahalan.

Gambar 4.3. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks daya beli merupakan salah satu komponen IPM. Indeks daya beli dicerminkan oleh pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Indeks daya beli penduduk menggambarkan kondisi relatif daya beli antar wilayah dan antar waktu. Sehubungan dengan hal tersebut daya beli penduduk yang dicerminkan dari komponen IPM ini tidak dapat diinterpretasikan berdasarkan angka nominalnya, melainkan harus diinterpretasi secara riil, dengan membandingkannya antar wilayah dan antar waktu. Daya beli masyarakat OKU Selatan tahun 2010 sebesar Rp 6.214.000,- per kapita per tahun. Selalu meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2018 menjadi Rp 8.445.000,- dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 8.830.000,- per kapita per tahun. Peningkatan ini menunjukkan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten OKU Selatan. Usaha nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan ekonomi cukup banyak dan memerlukan strategi yang matang. Usaha tersebut di antaranya kredit usaha, bantuan sosial, pendidikan vokasi, regulasi kemudahan berusaha, program penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain.

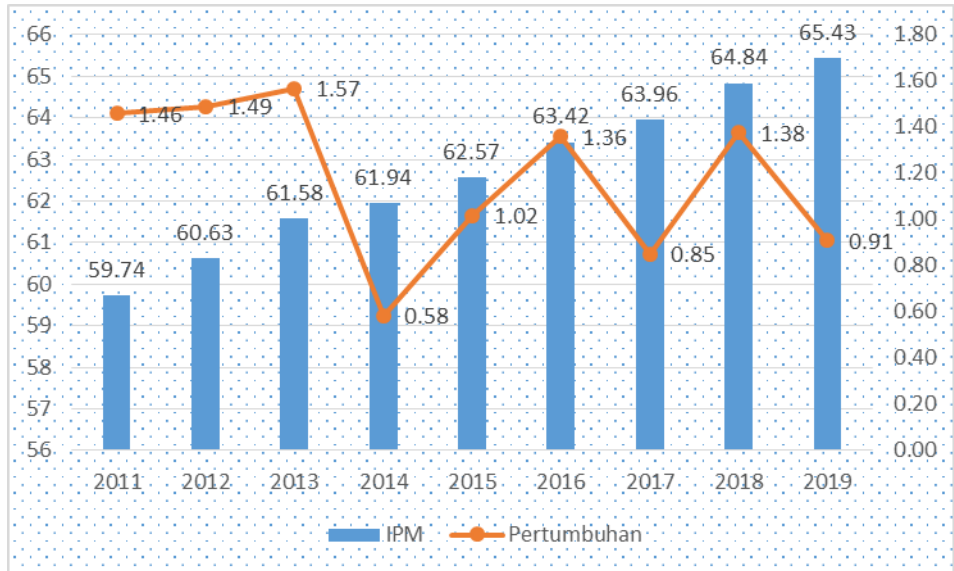
4.4. IPM Kabupaten OKU Selatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun

IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Sejak pertama kali digunakan IPM metode baru yakni tahun 2010, hingga tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan penghitungan IPM level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahun, termasuk IPM Kabupaten OKU Selatan.

IPM ini disusun dari tiga dimensi pembangunan manusia yakni dimensi kesehatan yang dicerminkan dengan indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan yang dicerminkan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta dimensi ekonomi yang dicerminkan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. IPM Kabupaten OKU Selatan dari tahun 2010 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat seperti pada gambar 4.4. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten OKU Selatan hanya sebesar 58,88 kemudian meningkat terus ditahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 64,84 pada tahun 2018 dan naik lagi menjadi 65,43 pada tahun 2019.

Gambar 4.4. Angka Dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia selama kurun waktu ini selalu mengalami perbaikan. Pemerintah harus selalu meningkatkan IPM ini dengan cara melakukan perbaikan dan peningkatan pada indikator-indikator penyusunnya pada setiap dimensi. Peningkatan di satu dimensi saja tidak cukup, karena pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh dari semua dimensi tersebut. Peningkatan di satu dimensi tidak dapat menggantikan kelemahan pada dimensi lain.

Dari gambar 4.4. di atas kita dapat melihat juga laju pertumbuhan IPM Kabupaten OKU Selatan sejak tahun 2010 hingga 2019. Secara umum pertumbuhan IPM sangat fluktuatif, walaupun sebenarnya nilai IPM senantiasa naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan IPM yang nyata maka sebenarnya haruslah dilakukan dengan menjaga tetap konsisten pertumbuhannya.

Pada hakikatnya IPM suatu wilayah tidak akan menurun besaran angkanya setiap tahunnya, kecuali ada peristiwa-peristiwa ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut seperti perang dan bencana alam yang menghancurkan manusia dan segala fasilitas yang menjadi pendukung untuk pilihan-pilihan manusia di wilayah tersebut. Pergerakan angka IPM sangat dinamis, sehingga kabupaten/kota dapat memacu peningkatan angka IPM tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung bagi pembangunan manusia di wilayahnya.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa secara umum seluruh komponen baik dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan. Perbedaannya hanya pada tingkat peningkatan komponen-komponen tersebut. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh usaha pemerintah dalam meningkatkan masing-masing indikator tersebut dan bagaimana proses pembangunan manusia dilakukan di masing-masing kabupaten/ kota tersebut.

Tabel 4.1. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia | | | | | Status |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Ogan Komering Ulu | 67.18 | 67.47 | 68.28 | 69.01 | 69,45 | Sedang |
| Ogan Komering Ilir | 64.73 | 65.44 | 66.11 | 66.57 | 66,96 | Sedang |
| Muara Enim | 65.82 | 66.71 | 67.63 | 68.28 | 68,88 | Sedang |
| Lahat | 65.25 | 65.75 | 66.38 | 66.99 | 67,62 | Sedang |
| Musi Rawas | 64.11 | 64.75 | 65.31 | 66.18 | 66,92 | Sedang |
| Musi Banyuasin | 65.76 | 66.45 | 66.96 | 67.57 | 67,83 | Sedang |
| Banyuasin | 64.15 | 65.01 | 65.85 | 66.40 | 66,90 | Sedang |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 62.57 | 63.42 | 63.96 | 64.84 | 65,43 | Sedang |
| Ogan Komering Ulu Timur | 67.17 | 67.38 | 67.84 | 68.58 | 69,34 | Sedang |
| Ogan Ilir | 65.35 | 65.45 | 65.63 | 66.43 | 67,22 | Sedang |
| Empat Lawang | 63.55 | 64.00 | 64.21 | 64.81 | 65,10 | Sedang |
| Pali | 60.83 | 61.66 | 62.58 | 63.49 | 64,33 | Sedang |
| Musi Rawas Utara | 62.32 | 63.05 | 63.18 | 63.75 | 64,32 | Sedang |
| Palembang | 76.29 | 76.59 | 77.22 | 77.89 | 78,44 | Tinggi |
| Prabumulih | 73.19 | 73.38 | 73.58 | 74.04 | 74,40 | Tinggi |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pagar Alam | 65.37 | 65.96 | 66.81 | 67.62 | 68,44 | Sedang |
| Lubuk Linggau | 73.17 | 73.57 | 73.67 | 74.09 | 74,81 | Tinggi |
| Sumatera Selatan | 67.46 | 68.24 | 68.86 | 69.39 | 70,02 | Tinggi |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika melihat IPM tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa IPM selalu meningkat untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tanpa terkecuali. Perbedaannya hanya pada besarnya peningkatan tersebut yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan tiap komponennya.

Berdasarkan klasifikasi IPM, Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori tinggi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2019 terklasifikasi dalam dua kategori yakni tinggi dan sedang. Sebagian besar kabupaten/kota termasuk dalam kategori sedang termasuk salah satu di dalamnya adalah Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan yang termasuk dalam kategori tinggi hanya Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau.

Lampiran Tabel

Tabel 5.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

| Kecamatan/ District | Luas Wilayah/ Total Area | | Penduduk/ Population | | Kepadatan Penduduk/ Density (Orang/Km ²) |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---|
| | Km ² | % | Jumlah/ Total | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Mekakau Ilir | 261,15 | 4,75 | 20 069 | 5.56 | 76.09 |
| 2. Banding Agung | 276,38 | 5,03 | 21 253 | 5.88 | 76 |
| 3. Warkuk Ranau Selatan | 239,48 | 4,36 | 23 136 | 6.4 | 95.48 |
| 4. BPR Ranau Tengah | 353,20 | 6,43 | 22 055 | 6.1 | 61.72 |
| 5. Buay Pemaca | 714,52 | 13,01 | 43 719 | 12.11 | 60.53 |
| 6. Simpang | 342,29 | 6,23 | 14 607 | 4.05 | 42.22 |
| 7. Buana Pemaca | 190,10 | 3,46 | 13 274 | 3.68 | 69.09 |
| 8. Muaradua | 261,95 | 4,77 | 47 852 | 13.25 | 180.66 |
| 9. Buay Rawan | 167,00 | 3,04 | 13 492 | 3.74 | 79.87 |
| 10. Buay Sandang Aji | 450,00 | 8,19 | 18 273 | 5.06 | 40.16 |
| 11. Tiga Dihaji | 153,45 | 2,79 | 9 819 | 2.72 | 63.32 |
| 12. Buay Runjung | 171,19 | 3,12 | 10 673 | 2.95 | 61.64 |
| 13. Runjung Agung | 157,41 | 2,87 | 12 153 | 3.37 | 76.35 |
| 14. Kisam Tinggi | 417,00 | 7,59 | 19 501 | 5.4 | 46.25 |
| 15. Muaradua Kisam | 219,80 | 4,00 | 18 565 | 5.14 | 83.52 |
| 16. Kisam Ilir | 136,02 | 2,48 | 7 598 | 2.1 | 55.23 |
| 17. Pulau Beringin | 476,51 | 8,67 | 25 612 | 7.09 | 53.14 |
| 18. Sindang Danau | 210,00 | 3,82 | 9 362 | 2.59 | 44.07 |
| 19. Sungai Are | 296,49 | 5,40 | 10 072 | 2.79 | 33.63 |
| Kabupaten OKU Selatan | 5 493,94 | 100,00 | 361 085 | 100,00 | 66,00 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.2. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019

| Kecamatan/ <i>District</i> | Jenis Kelamin/Sex | | Jumlah/ <i>Total</i> | Rasio Jenis Kelamin/ Sex Ratio |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | Laki-Laki/ <i>Male</i> | Perempuan/ <i>Female</i> | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Mekakau Ilir | 10 499 | 9 570 | 20 069 | 109,71 |
| 2. Banding Agung | 10 935 | 10 318 | 21 253 | 105,98 |
| 3. Warkuk Ranau Selatan | 12 257 | 10 879 | 23 136 | 112,67 |
| 4. BPR Ranau Tengah | 11 518 | 10 537 | 22 055 | 109,31 |
| 5. Buay Pemaca | 24 000 | 19 719 | 43 719 | 121,71 |
| 6. Simpang | 7 476 | 7 131 | 14 607 | 104,84 |
| 7. Buana Pemaca | 6 995 | 6 279 | 13 274 | 111,40 |
| 8. Muaradua | 24 244 | 23 608 | 47 852 | 102,69 |
| 9. Buay Rawan | 6 987 | 6 505 | 13 492 | 107,41 |
| 10. Buay Sandang Aji | 9 506 | 8 767 | 18 273 | 108,43 |
| 11. Tiga Dihaji | 5 248 | 4 571 | 9 819 | 114,81 |
| 12. Buay Runjung | 5 571 | 5 102 | 10 673 | 109,19 |
| 13. Runjung Agung | 6 321 | 5 832 | 12 153 | 108,38 |
| 14. Kisam Tinggi | 10 564 | 8 937 | 19 501 | 118,21 |
| 15. Muaradua Kisam | 9 605 | 8 960 | 18 565 | 107,20 |
| 16. Kisam Ilir | 3 977 | 3 621 | 7 598 | 109,83 |
| 17. Pulau Beringin | 13 248 | 12 364 | 25 612 | 107,15 |
| 18. Sindang Danau | 4 734 | 4 628 | 9 362 | 102,29 |
| 19. Sungai Are | 5 323 | 4 749 | 10 072 | 112,09 |
| Jumlah/Total | 189 008 | 172 077 | 361 085 | 109,84 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019

| Kelompok Umur/ <i>Age Group</i> | Jenis Kelamin/Sex | | Jumlah/ <i>Total</i> |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Laki-Laki/ <i>Male</i> | Perempuan/ <i>Female</i> | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 - 4 | 17 557 | 17 461 | 35 018 |
| 5 - 9 | 17 203 | 17 102 | 34 305 |
| 10 - 14 | 16 739 | 15 766 | 32 505 |
| 15 - 19 | 14 653 | 12 433 | 27 086 |
| 20 - 24 | 14 886 | 12 947 | 27 833 |
| 25 - 29 | 16 135 | 14 389 | 30 524 |
| 30 - 34 | 17 311 | 14 995 | 32 306 |
| 35 - 39 | 15 955 | 14 064 | 30 019 |
| 40 - 44 | 13 937 | 12 417 | 26 354 |
| 45 - 49 | 12 064 | 10 727 | 22 791 |
| 50 - 54 | 10 182 | 9 195 | 19 377 |
| 55 - 59 | 8 160 | 7 438 | 15 598 |
| 60 - 64 | 6 777 | 5 772 | 12 549 |
| 65 - 69 | 3 707 | 3 307 | 7 014 |
| 70 - 74 | 2 012 | 2 065 | 4 077 |
| 75 + | 1 730 | 1 999 | 3 729 |
| Jumlah/Total | 189 008 | 172 077 | 361 085 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan, 2019

| Kecamatan Subdistrict | Rumah Sakit Hospital | Puskesm as Public Health Centre | Puskesmas Pembantu Subsidiary of Public Health Centre | Poskesd es Village Health Centre | Klinik/Bal ai Kesehatan Clinic/Hea lth Centre |
|----------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Mekakau Ilir | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2. Banding Agung | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 3. Warkuk Ranau Selatan | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 4. BPR Ranau Tengah | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 5. Buay Pemaca | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 6. Simpang | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 7. Buana Pemaca | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 8. Muaradua | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 9. Buay Rawan | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 10. Buay Sandang Aji | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 11. Tiga Dihaji | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 12. Buay Runjung | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13. Runjung Agung | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 14. Kisam Tinggi | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 15. Muaradua Kisam | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 16. Kisam Ilir | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 17. Pulau Beringin | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 18. Sindang Danau | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19. Sungai Are | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 19 | 4 | 222 | 1 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.5. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten OKU Selatan, 2013-2019

| Tenaga Kesehatan Health Personnels | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Dokter Umum/ <i>General Doctor</i> | 15 | 15 | 16 | 21 | 33 | 14 | 30 |
| 2. | Dokter Spesialis/ <i>Specialist</i> | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 14 |
| 3. | Dokter Gigi/ <i>Dentist</i> | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Bidan/ <i>Midwife</i> | 390 | 496 | 422 | 290 | 313 | 203 | 311 |
| 5. | Bidan Desa/ <i>Village Midwife</i> | 171 | 138 | 240 | 244 | 252 | 252 | 281 |
| 6. | Perawat/ <i>Nurse</i> | 288 | 288 | 252 | 310 | 352 | 162 | 316 |
| 7. | Perawat Gigi/ <i>Dental Nurse</i> | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 2 | 11 |
| 8. | Farmasi/ <i>Farmacist</i> | 29 | 27 | 20 | 10 | 18 | 8 | 20 |
| 9. | Ahli Gizi/ <i>Nutritionist</i> | 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | 0 | 10 |
| 10. | Tukang Gigi/ <i>Tooth Maker</i> | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Sanitarian/ <i>Sanitarian</i> | 18 | 22 | 32 | 16 | 21 | 0 | 21 |
| 12. | Lainnya/ <i>Others</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.6. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2019

| | Kecamatan Subdistrict | Sekolah Schools | Murid Pupils | Guru Teachers | Rasio Murud- Guru Pupil-Teacher Ratio |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Mekakau Ilir | 15 | 2 884 | 197 | 14.64 |
| 2. | Banding Agung | 17 | 2 333 | 221 | 10.56 |
| 3. | Warkuk Ranau Selatan | 18 | 2 512 | 235 | 10.69 |
| 4. | BPR Ranau Tengah | 19 | 2 589 | 218 | 11.88 |
| 5. | Buay Pemaca | 28 | 4 240 | 268 | 15.82 |
| 6. | Simpang | 8 | 1 841 | 129 | 14.27 |
| 7. | Buana Pemaca | 9 | 1 597 | 102 | 15.66 |
| 8. | Muaradua | 23 | 5 223 | 338 | 15.45 |
| 9. | Buay Rawan | 10 | 1 964 | 134 | 14.66 |
| 10. | Buay Sandang Aji | 15 | 1 967 | 156 | 12.61 |
| 11. | Tiga Dihaji | 8 | 881 | 78 | 11.29 |
| 12. | Buay Runjung | 12 | 1 180 | 113 | 10.44 |
| 13. | Runjung Agung | 13 | 1 169 | 134 | 8.72 |
| 14. | Kisam Tinggi | 19 | 2 238 | 189 | 11.84 |
| 15. | Muaradua Kisam | 19 | 1 946 | 172 | 11.31 |
| 16. | Kisam Ilir | 8 | 772 | 66 | 11.70 |
| 17. | Pulau Beringin | 17 | 2 881 | 197 | 14.62 |
| 18. | Sindang Danau | 9 | 905 | 111 | 8.15 |
| 19. | Sungai Are | 11 | 1 210 | 131 | 9.24 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | | 278 | 40 332 | 3189 | 12,65 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2019

| | Kecamatan Subdistrict | Sekolah Schools | Murid Pupils | Guru Teachers | Rasio Murud- Guru Pupil-Teacher Ratio |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Mekakau Ilir | 3 | 713 | 67 | 10.64 |
| 2. | Banding Agung | 2 | 788 | 69 | 11.42 |
| 3. | Warkuk Ranau Selatan | 3 | 518 | 46 | 11.26 |
| 4. | BPR Ranau Tengah | 2 | 675 | 64 | 10.55 |
| 5. | Buay Pemaca | 5 | 1378 | 92 | 14.98 |
| 6. | Simpang | 2 | 611 | 35 | 17.46 |
| 7. | Buana Pemaca | 4 | 542 | 45 | 12.04 |
| 8. | Muaradua | 9 | 1845 | 155 | 11.90 |
| 9. | Buay Rawan | 3 | 505 | 47 | 10.74 |
| 10. | Buay Sandang Aji | 4 | 803 | 74 | 10.85 |
| 11. | Tiga Dihaji | 2 | 524 | 40 | 13.10 |
| 12. | Buay Runjung | 3 | 417 | 36 | 11.58 |
| 13. | Runjung Agung | 3 | 549 | 46 | 11.93 |
| 14. | Kisam Tinggi | 6 | 890 | 61 | 14.59 |
| 15. | Muaradua Kisam | 5 | 852 | 73 | 11.67 |
| 16. | Kisam Ilir | 2 | 343 | 19 | 18.05 |
| 17. | Pulau Beringin | 4 | 959 | 83 | 11.55 |
| 18. | Sindang Danau | 3 | 468 | 56 | 8.36 |
| 19. | Sungai Are | 3 | 498 | 60 | 8.30 |
| | Ogan Komering Ulu Selatan | 68 | 13878 | 1168 | 11,88 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.8. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2019

| | Kecamatan Subdistrict | Sekolah Schools | Murid Pupils | Guru Teachers | Rasio Murud- Guru Pupil-Teacher Ratio |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Mekakau Ilir | 1 | 290 | 37 | 7.84 |
| 2. | Banding Agung | 1 | 609 | 38 | 16.03 |
| 3. | Warkuk Ranau Selatan | 2 | 382 | 35 | 10.91 |
| 4. | BPR Ranau Tengah | 1 | 513 | 41 | 12.51 |
| 5. | Buay Pemaca | 2 | 855 | 52 | 16.44 |
| 6. | Simpang | 1 | 560 | 36 | 15.56 |
| 7. | Buana Pemaca | - | - | - | - |
| 8. | Muaradua | 3 | 1099 | 78 | 14.09 |
| 9. | Buay Rawan | 1 | 275 | 23 | 11.96 |
| 10. | Buay Sandang Aji | 1 | 287 | 25 | 11.48 |
| 11. | Tiga Dihaji | 1 | 320 | 20 | 16.00 |
| 12. | Buay Runjung | 1 | 80 | 13 | 6.15 |
| 13. | Runjung Agung | 2 | 369 | 31 | 11.90 |
| 14. | Kisam Tinggi | 1 | 351 | 25 | 14.04 |
| 15. | Muaradua Kisam | 2 | 465 | 38 | 12.24 |
| 16. | Kisam Ilir | 1 | 303 | 18 | 16.83 |
| 17. | Pulau Beringin | 2 | 773 | 52 | 14.87 |
| 18. | Sindang Danau | 2 | 290 | 32 | 9.06 |
| 19. | Sungai Are | 1 | 329 | 37 | 8.89 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | | 26 | 8 150 | 631 | 12,92 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan

Tabel 5.9 IPM Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019

| Tahun | Angka Harapan Hidup | Angka Harapan Lama Sekolah | Rata-Rata Lama Sekolah | Daya Beli (000 Rp.) | IPM | Pertumbuhan |
|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2010 | 65,68 | 10,76 | 6,70 | 6.214,01 | 58,88 | |
| 2011 | 65,72 | 10,78 | 6,88 | 6.567,99 | 59,74 | 1,46 |
| 2012 | 65,75 | 10,92 | 6,92 | 7.017,84 | 60,63 | 1,49 |
| 2013 | 65,77 | 11,08 | 7,26 | 7.254,19 | 61,58 | 1,57 |
| 2014 | 65,78 | 11,21 | 7,30 | 7.380,02 | 61,94 | 0,58 |
| 2015 | 66,08 | 11,22 | 7,46 | 7.581,10 | 62,57 | 1,02 |
| 2016 | 66,16 | 11,58 | 7,47 | 7.902,00 | 63,42 | 1,36 |
| 2017 | 66,24 | 11,72 | 7,66 | 7.997,00 | 63,96 | 0,85 |
| 2018 | 66,49 | 11,73 | 7,86 | 8.445,00 | 64,84 | 1,38 |
| 2019 | 66,76 | 11,74 | 7,83 | 8.830,00 | 65,43 | 0,91 |

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. BPS: Jakarta.

Bappeda dan PM Kabupaten OKU Selatan. 2019. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018*. Bappeda dan PM Kabupaten OKU Selatan: Muaradua.

www.bps.go.id

www.ipm.bps.go.id

www.sirusa.bps.go.id

www.okuselatankab.bps.go.id

www.sumsel.bps.go.id